

KATA PENGANTAR

Assamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,
Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, atas ijinnya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2014 dapat disusun.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Tahun 2013 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhirnya, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut turut serta memberikan masukan dalam penyusunan dokumen ini. Semoga LAKIP Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 dapat bermanfaat dalam memberikan informasi capaian pelaksanaan kinerja pembangunan khususnya dilingkungan Bappeda dan Pemerintah Daerah Provinsi Banten pada Umumnya.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Serang, 2014

KEPALA BAPPEDA,

Ir. H. MOH. YANUAR, MP
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 19610101 0198802 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii-iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan dan Sasaran	3
1.3. Dasar Hukum	4
1.4. Tugas Pokok dan Fungsi	5
1.5. Struktur Organisasi	26
BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	27
2.1. RPJMD Provinsi Banten	27
2.2. Rencana Strategis	28
2.3. Target Kinerja Tahun 2013	36
2.4. Program dan Kegiatan Tahun 2013	38
2.5. Anggaran Per Kegiatan	41
2.6. Tolok Ukur dan Target Kinerja	42
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEDA PROVINSI BANTEN 2013	102
3.1. Evaluasi Kinerja	103
3.2. Akutanbilitas Keuangan	148
BAB IV PENUTUP	156

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang secara operasional dilakukan melalui program dan kegiatan harus diinformasikan secara akuntabilitas, karena pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang ditunjang dengan program dan kegiatan akan membutuhkan biaya pada setiap Tahun Anggarannya.

Penyampaian data dan informasi secara akuntabilitas merupakan pelaporan kinerja dari Instansi pemerintah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku unsur penyelenggara pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dari rencana yang telah ditetapkan pada satu Tahun Anggaran dengan tetap berdasarkan pada perencanaan 5 (lima) Tahun Anggaran atau perencanaan jangka menengah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD)

Selanjutnya dalam rangka peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai wujud dari pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta peningkatan pelaksanaan pembangunan yang berbasis pelayanan publik, maka perlu adanya suatu pelaporan kinerja dari pelaksanaan rencana pembangunan secara akuntabilitas.

Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku unsur penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya harus berdasarkan pada suatu dokumen perencanaan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, karena setiap Instansi Pemerintah berkewajiban menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga sesuai dengan yang diamanatkan dalam keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaporan kinerja ini, dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah atau SKPD dalam satu Tahun Anggaran yang dihubungkan dengan proses tujuan dan sasaran instansi pemerintah atau SKPD yang menjelaskan keberhasilan atau kegagalan pada tingkat kinerja yang dicapainya secara bertanggung jawab.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah disampaikan secara periodik dan akuntabilitas. Artinya bahwa laporan kinerja tersebut merupakan kewajiban untuk disampaikan sebagai pertanggungjawaban kepada pihak yang memiliki hak atau meminta keterangan atau pertanggung jawaban kinerja instansi pemerintah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai penjabaran Visi, Misi SKPD yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Laporan kinerja yang disampaikan secara periodik, tersebut adalah merupakan suatu penilaian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang didukung dengan kegiatan program yang pelaksanaannya telah direncanakan secara berkesinambungan baik pada kurun waktu jangka menengah atau Tahunan. Sehingga laporan kinerja tersebut harus benar-benar transparan, terukur dan harus dapat dipertanggungjawabkan nilai capaiannya secara tepat dan terarah, sehingga laporan kinerja dimaksud merupakan informasi penting bagi pemangku

kepentingan baik sebagai informasi biasa maupun sebagai bahan perbaikan instansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang didukung oleh kegiatan program pada periode Tahun Anggaran berikutnya.

1.2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta meningkatkan kualitas dan kuantitas data dan informasi kinerja dari instansi pemerintah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, dengan sasaran meliputi sebagai berikut:

1. Tersusunnya Data Dan Informasi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Program Pembangunan Instansi Pemerintah Atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Hal Ini Adalah Bappeda Provinsi Banten Yang Sesuai Dengan Tugas, Pokok Dan Fungsi Serta Kewenangannya Untuk Tahun Anggaran 2014.
2. Teridentifikasi Data Capaian Kinerja Dari Indikator Kinerja Kegiatan Program Yang Direncanakan Pada Tahun Anggaran 2014 Sesuai Dengan Yang Tertuang Dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai Acuan Pelaksanaan Kegiatan Program Yang Dilaksanakan Oleh Bappeda Provinsi Banten.
3. Teridentifikasi Data Dan Informasi Bahan Penyusunan Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran Berikutnya, Yaitu Tahun Anggaran 2014.

4. Terinformasikan Kinerja Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Bappeda Provinsi Banten Yang Terurai Dalam Indikator Kinerja Yang Telah Ditetapkan Dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2014.

1.3. DASAR HUKUM

Dasar hukum dari Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut ;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;

11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi;
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 1);
13. Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten;
14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 27 Tahun 2013 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 27);
15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 31);
16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 1);
17. Peraturan Gubernur Banten Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
18. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014;
19. Surat Keputusan Kepala DPPKD selaku PPKD Nomor: 915/009-SK.PPKD/I/2014 tanggal 17 Januari 2014 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014.

1.4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten.

Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten. Bappeda Provinsi Banten yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah pemerintah Provinsi, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan fungsi dan tugas mulai dari Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Sub Bidang sebagai berikut:

A. Kepala Badan

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi;
 - b. penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro;
 - c. pengkoordinasian, memfasilitasi dan menyusun rencana strategis daerah dan dokumen perencanaan daerah lainnya;
 - d. penyiapan dan penyusunan kebijakan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
 - e. penyusunan rencana pembiayaan pembangunan dan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi baik rutin maupun pembangunan dengan koordinasi Sekretaris Daerah;
 - f. penyusunan, perencanaan dan pengkoordinasian dibidang penataan ruang dan prasarana wilayah, perekonomian, sosial kemasyarakatan, pemerintahan, perencanaan program dan anggaran pembangunan serta bidang pengendalian program pembangunan;

- g. pengkoordinasian perencanaan dan pengendalian dengan dinas/badan/lembaga dalam lingkungan Pemerintah Provinsi, maupun dengan instansi lainnya;
 - h. evaluasi dan pelaporan perkembangan pelaksanaan perencanaan program kegiatan tahunan dan daerah;
 - i. pemberian fasilitas dan media perencanaan lintas Kabupaten dan Kota;
 - j. pemberian pelayanan informasi dalam bidang kebijakan perencanaan daerah;
 - k. pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan;
 - l. penataan dan pelaksanaan tugas kesekretariatan;
 - m. pengawasan dan pengendalian internal Badan;
 - n. pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja dan rencana strategis Badan;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan perencanaan daerah dengan dinas, badan, baik dalam lingkungan Pemerintah Provinsi maupun dengan instansi lainnya;
 - c. mengkoordinasikan rencana pembangunan dan tata ruang wilayah regional secara makro;
 - d. mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis daerah dan atau dokumen perencanaan dan pembangunan daerah lainnya;
 - e. mengkoordinasikan penyusunan program pembangunan yang diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan kedalam program nasional;
 - f. mengkoordinasikan penyusunan rencana pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dengan koordinasi sekretaris daerah;
 - g. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan perencanaan daerah;
 - h. memberikan pelayanan informasi tentang kebijakan perencanaan daerah;
 - i. memfasilitasi dan mediasi kegiatan perencanaan lintas kabupaten dan kota dan antar wilayah/provinsi;
 - j. melaksanakan penyusunan perencanaan program dan anggaran pembangunan, jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
 - k. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi program dan anggaran kerjasama pembangunan;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan;

- m. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
 - n. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud, membawahkan:
- a. Sekretaris;
 - b. Kepala Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah;
 - c. Kepala Bidang Perekonomian;
 - d. Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan;
 - e. Kepala Bidang Pemerintahan;
 - f. Kepala Bidang Perencanaan Program dan Anggaran Pembangunan;
 - g. Kepala Bidang Pengendalian Program Pembangunan;
 - h. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Sekretaris

- (1) Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. perumusan kebijakan, pedoman, standarisasi, koordinasi, pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
 - c. perumusan pengaturan, pembinaan, pengembangan pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
 - d. pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan standarisasi program administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
 - e. penyiapan data dan bahan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
 - f. pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penyusunan program evaluasi dan pelaporan;

- g. pengelolaan dan penyelenggaraan data dan informasi;
 - h. pengawasan dan pengendalian internal Badan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja kesekretariatan Badan;
 - b. menyiapkan bahan kebijakan, pedoman, standardisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
 - d. menyiapkan bahan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
 - e. menyiapkan bahan program dan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
 - f. menyiapkan bahan kegiatan kesekretariatan, perlengkapan, kerumahtanggaan, perpustakaan, kehumasan, Pejabat Pengelola Informasi Data Pembantu, penyusunan program dan data pembangunan;
 - g. menyiapkan bahan kegiatan pengelolaan keuangan;
 - h. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian Badan;
 - i. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
 - j. melaksanakan pengawasan dan pengendalian internal Badan;
 - k. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud, membawahkan:
- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kepala SubBagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

C. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumahtangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan inventaris barang dan aset Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja sub bagian;

- b. melaksanakan administrasi ketatausahaan Badan;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga Badan;
- d. melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
- e. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang Badan;
- f. melaksanakan pengelolaan inventaris barang dan aset Badan;
- g. melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor serta lingkungannya;
- h. melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin berkala inventaris barang dan aset Badan;
- i. melaksanakan fungsi kehumasandan administrasi pengelolaan informasi data pembantu;
- j. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan administrasi kepegawaian lingkup Badan;
- k. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

D. Kepala Sub Bagian Keuangan

- (1) Kepala Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kas anggaran, pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja sub bagian;
 - b. melaksanakan penyiapan rencana anggaran kas kegiatan di lingkungan Badan;
 - c. menyusun standar operasional dan prosedur keuangan Badan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan pembayaran dan pengeluaran anggaran belanja Badan dari sumber APBD maupun APBN;
 - e. melaksanakan kegiatan perbendaharaan dalam rangka pembiayaan kegiatan Badan sesuai anggaran yang telah ditetapkan;
 - f. melaksanakan pembayaran gaji pegawai sesuai ketentuan yang berlaku;
 - g. melaksanakan penatausahaan keuangan dari proses penganggaran, pelaksanaan, pembukuan, pengeluaran, evaluasi, verifikasi dan pelaporan keuangan Badan;
 - h. melaksanakan administrasi pemungutan, pelaporan, dan penyetoran pajak-pajak;
 - i. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan;

- j. melaksanakan pengawasan administrasi kebendaharawanan lingkup Badan;
- k. melaksanakan dan menyusun laporan pengawasan dan pengendalian internal Badan;
- l. melaksanakan penyiapan data, perhitungan kas anggaran dan belanja serta melaksanakan fungsi tata usaha keuangan Badan;
- m. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

E. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

- (1) Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan perumusan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja sub bagian;
 - b. menyusun rencana kerja Badan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis Badan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan rencana anggaran belanja Badan dari sumber APBD maupun APBN;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan Badan;
 - f. melaksanakan penyusunan, pengolahan data dan informasi internal badan dan pembangunan daerah;
 - g. menyusun pelaporan dan evaluasi program dan kegiatan Badan;
 - h. melaksanakan penyusunan laporan kinerja Badan;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan pengumpulan indikator keberhasilan kegiatan Badan;
 - j. melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan kedalam program kegiatan;
 - k. melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan Badan dari Pemerintah Pusat untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - l. melaksanakan penyiapan bahan petunjuk pelaksanaan kegiatan Badan;
 - m. melaksanakan pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari dana APBD maupun APBN;
 - n. melaksanakan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari dana APBD dan APBN;
 - o. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

F. Kepala Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah

- (1) Kepala Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi dibidang penataan ruang dan lingkungan hidup, serta penataan infrastruktur wilayah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran dan pengendalian bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan penataan infrastruktur wilayah pada mitra bidang;
 - b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor dan wilayah serta perencanaan strategis daerah bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan penataan infrastruktur wilayah;
 - c. pengkoordinasian dan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas untuk bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan penataan infrastruktur wilayah;
 - d. pelaksanaan analisis permasalahan dibidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
 - e. pelaksanaan penyiapan bahan pengaturan, pembinaan dan pengawasan penataan ruang;
 - f. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan mitra bidangnya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja Bidang;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor dan wilayah serta perencanaan strategis daerah dibidang tata ruang dan lingkungan hidup serta penataan infrastruktur wilayah;
 - c. menyiapkan bahan pengendalian kebijakan perencanaan tata ruang pembangunan antar sektor dan wilayah dibidang tata ruang dan lingkungan hidup serta penataan infrastruktur wilayah;
 - d. menyiapkan bahan penilaian kelayakan usulan-usulan program/proyek dan kegiatan prioritas dibidang tata ruang dan lingkungan hidup serta penataan infrastruktur wilayah;

- e. menyiapkan analisis permasalahan dibidang tata ruang dan lingkungan hidup serta penataan infrastruktur wilayah serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
 - f. menyiapkan program bidang penataan ruang dan prasarana wilayah dengan rencana strategis Badan;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
 - h. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
 - i. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud, membawahkan:
- a. Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
 - b. Kepala Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah.

G. Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

- (1) Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja sub bidang;
 - b. mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian ruang dan lingkungan hidup;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan strategis daerah dibidang penataan ruang dan lingkungan hidup;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengendalian mitra Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
 - e. melaksanakan pengolahan data dan informasi dibidang perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
 - g. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

H. Kepala Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah

- (1) Kepala Sub Bidang Penataan Insfrastruktur Wilayah sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan penataan infrastruktur wilayah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja sub bidang;
 - b. mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan penataan infrastruktur wilayah;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan strategis daerahbidang penataan infrastruktur wilayah;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengendalian mitra Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah;
 - e. melaksanakan pengolahan data dan informasi dibidang perencanaan penataan infrastruktur wilayah;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
 - g. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

I. Kepala Bidang Perekonomian

- (1) Kepala Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi dibidang perindustrian, perdagangan, investasi, koperasi dan UMKM, budaya dan pariwisata, tenaga kerja dan transmigrasi serta ketahanan pangan dan agribisnis.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perekonomian mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan pengendalian bidang perindustrian, perdagangan, investasi, koperasi dan UMKM, Budaya dan Pariwisata, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, ketahanan pangan dan agribisnis, serta mitra bidangnya;
 - b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor dan wilayah, serta perencanaan strategis daerah dibidang perindustrian, perdagangan, investasi, koperasi dan

- UMKM, budaya dan pariwisata, tenaga kerja dan transmigrasi serta ketahanan pangan dan agribisnis;
- c. pengkoordinasian dan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas untuk sektor perindustrian, perdagangan, investasi, koperasi dan UMKM, budaya dan pariwisata, tenaga kerja dan transmigrasi serta ketahanan pangan dan agribisnis;
 - d. pelaksanaan analisis permasalahan dibidang perekonomian serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
 - e. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan mitra bidangnya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perekonomian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja bidang;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan dibidang perindustrian, perdagangan, investasi, koperasi dan UMKM, budaya dan pariwisata, tenaga kerja dan transmigrasi serta ketahanan pangan dan agribisnis;
 - c. menyiapkan bahan pengendalian kebijakan perencanaan perindustrian, perdagangan, investasi, koperasi dan UMKM, budaya dan pariwisata, tenaga kerja dan transmigrasi serta ketahanan pangan dan agribisnis;
 - d. menyiapkan bahan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas dibidang perindustrian, perdagangan, investasi, koperasi dan UMKM, budaya dan pariwisata, tenaga kerja dan transmigrasi serta ketahanan pangan dan agribisnis;
 - e. menyiapkan analisis permasalahan dibidang perindustrian, perdagangan, investasi, koperasi dan UMKM, budaya dan pariwisata, tenaga kerja dan transmigrasi serta ketahanan pangan dan agribisnis serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
 - f. menyiapkan program bidang perindustrian, perdagangan, investasi, koperasi dan UMKM, budaya dan pariwisata, tenaga kerja dan transmigrasi serta ketahanan pangan dan agribisnis;
 - g. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
 - h. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Perekonomian, membawahkan:
- a. Kepala Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Investasi;
 - b. Kepala Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Agribisnis.

J. Kepala Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Investasise

- (1) Kepala Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Investasise bagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perekonomian dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang perindustrian, perdagangan dan investasi, koperasi dan UMKM, budaya dan pariwisata, tenaga kerja dan transmigrasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Investasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja Sub Bidang;
 - b. mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan strategis daerah dibidang perindustrian, perdagangan dan investasi, koperasi dan UMKM, budaya dan pariwisata, tenaga kerja dan transmigrasi;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang perindustrian, perdagangan dan investasi, koperasi dan UMKM, budaya dan pariwisata, tenaga kerja dan transmigrasi;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengendalian mitra Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Investasi;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
 - f. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

K. Kepala Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Agribisnise

- (1) Kepala Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Agribisnis sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perekonomian dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang ketahanan pangan dan agribisnis.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Agribisnis mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja sub bidang;
 - b. mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan dibidang ketahanan pangan dan agribisnis;

- c. melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang Ketahanan Pangan dan Agribisnis;
- d. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengendalian mitra Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Agribisnis;
- e. melaksanakan pengolahan data dan informasi dibidang perencanaan dibidang ketahanan pangan dan agribisnis;
- f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
- g. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

L. Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan

- (1) Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi dibidang kesejahteraan sosial, gender, sumber daya manusia, budaya dan keagamaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran dan pengendalian bidang kesejahteraan sosial, gender, sumber daya manusia, budaya dan keagamaan pada mitra bidangnya;
 - b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan, serta perencanaan strategis daerah dibidang kesejahteraan sosial, gender, sumber daya manusia, budaya dan keagamaan, antar sektor dan wilayah;
 - c. pengkoordinasian, pengintegrasian, mensinkronasikan usulan-usulan program/kegiatan prioritas pembangunan kesejahteraan sosial, gender, sumber daya manusia, budaya dan keagamaan;
 - d. pelaksanaan analisis permasalahan dibidang sosial kemasyarakatan serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
 - e. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan mitra bidangnya;
 - f. pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja bidang;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan dan perencanaan strategis daerah bidang kesejahteraan sosial, gender, sumber daya manusia, budaya dan keagamaan;

- c. menyiapkan bahan pengendalian kebijakan perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial, gender, sumber daya manusia, budaya dan keagamaan;
 - d. merumuskan bahan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas dibidang kesejahteraan sosial, gender, sumber daya manusia, budaya dan keagamaan;
 - e. menyiapkan analisis permasalahan di kesejahteraan sosial, gender, sumber daya manusia, budaya dan keagamaan serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
 - f. menyiapkan program bidang kesejahteraan sosial, gender, sumber daya manusia, budaya dan keagamaan;
 - g. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
 - h. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud, membawahkan:
- a. Kepala SubBidang Kesejahteraan Sosial dan Gender;
 - b. Kepala SubBidang Sumber Daya Manusia, Budaya dan Keagamaan.

M. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan dan Gender

- (1) Kepala Sub Bidang Kesejahteraan dan Gender sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang kesejahteraan sosial dan gender.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Kesejahteraan dan Gender mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja sub bidang;
 - b. mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan strategis daerah dibidang kesejahteraan sosial dan gender;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang kesejahteraan sosial dan gender;
 - d. melaksanakan penyiapan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengendalian mitra Sub Bidang Kesejahteraan Sosial dan Gender;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
 - f. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

N. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia, Budaya dan Keagamaan

- (1) Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia, Budaya dan Keagamaan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang sumber daya manusia, budaya dan keagamaan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia, Budaya dan Keagamaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja sub bidang;
 - b. mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan strategis daerah pada bidang sumber daya manusia, budaya dan keagamaan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang sumber daya manusia, budaya dan keagamaan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengendalian mitra Sub Bidang Sumber Daya Manusia, Budaya dan Keagamaan;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
 - f. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

O. Kepala Bidang Pemerintahan

- (1) Kepala Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi dibidang tata pemerintahan, kerjasama pembangunan, politik, hukum, HAM dan ketertiban.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran dan pengendalian bidang tata pemerintahan, kerjasama pembangunan, politik, hukum, HAM dan ketertiban, serta mitra bidangnya;
 - b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor dan wilayah,serta perencanaan strategis daerah dibidang

- tata pemerintahan, kerjasama pembangunan, politik, hukum, HAM dan ketertiban;
- c. pengkoordinasian dan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas untuk sektor tata pemerintahan, kerjasama pembangunan, politik, hukum, HAM dan ketertiban;
 - d. pelaksanaan analisis permasalahan dibidang tata pemerintahan, kerjasama pembangunan, politik, hukum, HAM dan ketertiban serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
 - e. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan mitra bidangnya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pemerintahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja bidang;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan dan perencanaan strategis daerah dibidang tata pemerintahan, kerjasama pembangunan, politik, hukum, HAM dan ketertiban;
 - c. menyiapkan bahan pengendalian kebijakan tata pemerintahan, kerjasama pembangunan, politik, hukum, HAM dan ketertiban;
 - d. menyiapkan bahan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas dibidang tata pemerintahan, kerjasama pembangunan, politik, hukum, HAM dan ketertiban;
 - e. menyiapkan analisis permasalahan tata pemerintahan, kerjasama pembangunan, politik, hukum, HAM dan ketertiban serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
 - f. menyiapkan program bidang tata pemerintahan, kerjasama pembangunan, politik, hukum, HAM dan ketertiban;
 - g. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
 - h. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud, membawahkan:
- a. Kepala Sub Bidang Tata Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan;
 - b. Kepala Sub Bidang Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban.

P. Kepala Sub Bidang Tata Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan

- (1) Kepala Sub Bidang Tata Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemerintahan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan

penetapan kebijakan perencanaan dibidang tata pemerintahan dan kerjasama pembangunan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Tata Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja sub bidang;
 - b. mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan kerjasama pembangunan dan pengendalian di sub bidang tata pemerintahan dan kerjasama pembangunan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan kerjasama pembangunan dan pengendalian di sub bidang tata pemerintahan dan kerjasama pembangunan;
 - d. melaksanakan inisiasi, mediasi dan fasilitasi kerjasama pembangunan antar daerah;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengendalian, kerjasama pembangunan mitra Sub Bidang Tata Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
 - g. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

Q. Kepala Sub Bidang Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban

- (1) Kepala Sub Bidang Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemerintahan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja sub bidang;
 - b. mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan koordinasi perencanaan strategis daerah dan pengendalian di Sub Bidang Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan strategis daerah dan pengendalian di Sub Bidang Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban;;

- d. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, perencanaan strategis daerah dan pengendalian mitra Sub Bidang Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban;
- e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
- f. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

R. Kepala Bidang Perencanaan Program dan Anggaran Pembangunan

- (1) Kepala Bidang Perencanaan Program Anggaran dan Pembangunan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi dibidang perencanaan program pembangunan dan perencanaan penganggaran pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perencanaan Program dan Anggaran Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan kegiatan perencanaan program pembangunan dan perencanaan penganggaran pembangunan;
 - b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor dan wilayah dibidang perencanaan program pembangunan dan perencanaan penganggaran pembangunan;
 - c. pengkoordinasian dan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas sesuai rencana program pembangunan dan perencanaan penganggaran pembangunan;
 - d. pelaksanaan analisis permasalahan dibidang penganggaran pembangunan dan program pembangunan serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perencanaan Program dan Anggaran Pembangunan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja bidang;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan dibidang perencanaan program dan anggaran pembangunan;
 - c. menyiapkan bahan pengendalian kebijakan perencanaan program anggaran pembangunan dan program pembangunan;

- d. menyiapkan bahan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas dibidang perencanaan program pembangunan dan perencanaan penganggaran pembangunan;
 - e. menyiapkan analisis permasalahan perencanaan program pembangunan dan perencanaan penganggaran pembangunan, serta merumuskan langkah-langkah kebijakannya;
 - f. menyiapkan program bidang perencanaan program dan pembangunan;
 - g. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam proses perencanaan program dan anggaran pembangunan;
 - h. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Perencanaan Program dan Anggaran Pembangunan sebagaimana dimaksud, membawahkan:
- a. Kepala Sub Bidang Perencanaan Penganggaran Pembangunan;
 - b. Kepala Sub Bidang Perencanaan Program Pembangunan.

S. Kepala Sub Bidang Perencanaan Penganggaran Pembangunan

- (1) Kepala Sub Bidang Perencanaan Penganggaran Pembangunan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan Program dan Anggaran Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan penganggaran pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Perencanaan Penganggaran Pembangunan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja sub bidang;
 - b. mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan penganggaran pembangunan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan penganggaran pembangunan;
 - d. melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari Pemerintah Pusat untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian kebijakan perencanaan penganggaran pembangunan;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
 - g. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

T. Kepala Sub Bidang Perencanaan Program Pembangunan

- (1) Kepala Sub Bidang Perencanaan Program Pembangunan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan Program Anggaran dan Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan program pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Perencanaan Program Pembangunan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja sub bidang;
 - b. mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk dokumen perencanaan program pembangunan daerah;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan program pembangunan untuk dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian kebijakan perencanaan program pembangunan;
 - e. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
 - f. melaksanakan penyelarasan dokumen perencanaan jangka menengah kabupaten/kota dengan dokumen perencanaan jangka menengah provinsi;
 - g. melaksanakan verifikasi dokumen rencana strategis SKPD Provinsi Banten;
 - h. melaksanakan verifikasi dokumen perencanaan tahunan SKPD Provinsi Banten;
 - i. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

U. Kepala Bidang Pengendalian Program Pembangunan

- (1) Kepala Bidang Pengendalian Program Pembangunan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian dan evaluasi APBD dan pengendalian program APBN.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengendalian Program Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan kegiatan pengendalian dan evaluasi APBD dan pengendalian program APBN;

- b. pelaksanaan koordinasi dibidang pengendalian dan evaluasi APBD dan pengendalian program APBN;
 - c. pelaksanaan analisis permasalahan dibidang pengendalian dan evaluasi APBD dan pengendalian dan evaluasi APBN serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengendalian Program Pembangunan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja bidang;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan dibidang pengendalian dan evaluasi APBD dan pengendalian program APBN;
 - c. menyiapkan bahan pengendalian kebijakan dibidang pengendalian dan evaluasi APBD serta pengendalian program APBN;
 - d. menyiapkan bahan penilaian terhadap kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas dibidang pengendalian dan evaluasi APBD serta pengendalian program APBN;
 - e. menyiapkan analisis permasalahan perencanaan program dibidang pengendalian dan evaluasi APBD serta pengendalian dan evaluasi APBN;
 - f. menyiapkan program bidang pengendalian dan evaluasi APBD dan pengendalian dan evaluasi APBN;
 - g. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
 - h. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Pengendalian Program Pembangunan sebagaimana dimaksud, membawahkan:
- a. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

V. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- (1) Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengendalian Program Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan

dibidang Pengendalian dan Evaluasi APBD.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi APBD mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja sub bidang;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan koordinasi pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi APBD;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan Pengendalian dan Evaluasi APBD;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan berdasarkan hasil Pengendalian dan Evaluasi APBD;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait pada Pengendalian dan Evaluasi APBD;
 - f. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

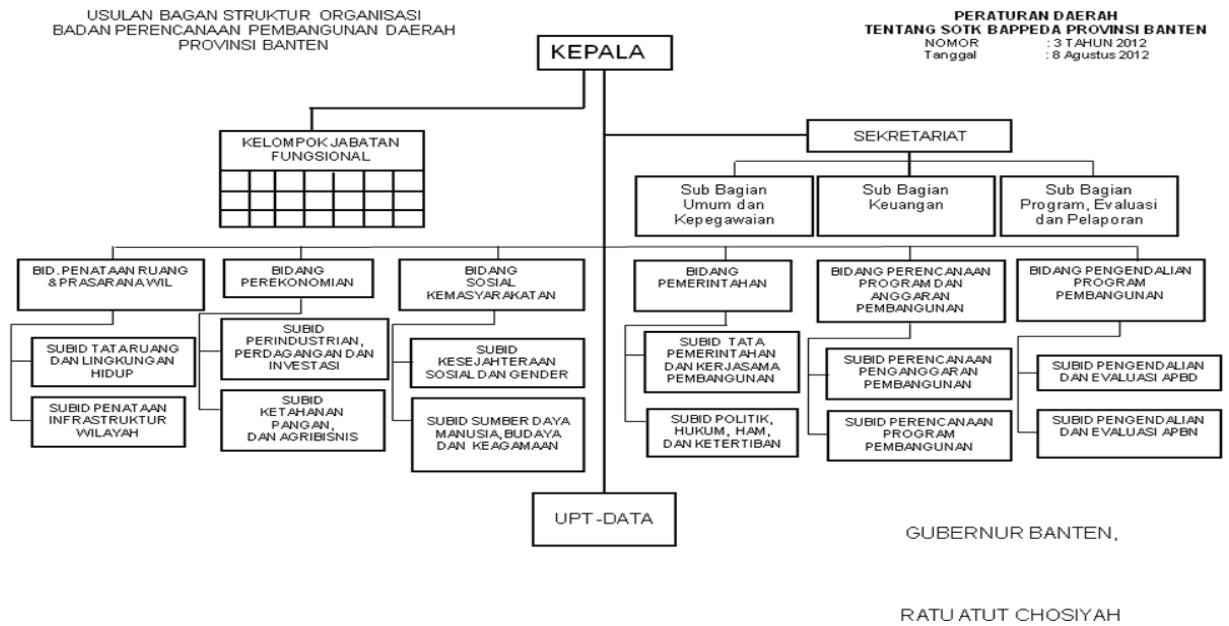
W. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

- (1) Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengendalian Program Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang Pengendalian Program APBN dan dana lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi APBN mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja sub bidang;
 - b. mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi perencanaan dibidang pengendalian program APBN dan dana lainnya;
 - c. melaksanakan penyiapan, perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang pengendalian program APBN dan dana lainnya;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian program APBN dan dana lainnya;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
 - f. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

1.5. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Bappeda Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

STRUKTUR BAPPEDA PROVINSI BANTEN



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RPJMD PROVINSI BANTEN

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025, bahwa RPJMD 2012-2017 merupakan Tahap *Akselerasi-I* dengan fokus pembangunan yang diprioritaskan pada 7 lingkup yaitu:

- 1) Ketahanan pangan, Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial;
- 2) Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia;
- 3) Pemantapan Kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian;
- 4) Pemantapan Kualitas Pelayanan Prasarana dan Sarana Wilayah;
- 5) Pengelolaan dan Revitalisasi Tata Ruang, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup;
- 6) Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih; dan
- 7) Pengembangan dan Pembangunan Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Strategis.

Sekurang-kurangnya tujuh fokus pembangunan tersebut merupakan mandat yang harus tertuang pada setiap periode RPJMD dan diemban oleh Gubernur Banten selama periode kepemimpinannya. Berdasarkan hal tersebut, maka visi, misi, dan program pokok kepala daerah harus merupakan pengejawantahan dari ketujuh fokus pembangunan tersebut yang akan diimplementasikan selama masa jabatannya.

VISI

Dengan melandasi kebijakan yang tertuang dalam dokumen RPJPD 2005-2025, maka RPJMD 2012-2017 memasuki tahap *Akselerasi-I* dengan fokus pembangunan tetap pada upaya percepatan: *penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan kesejahteraan sosial; pemantapan kualitas sumberdaya manusia; pemantapan kualitas dan pemerataan perekonomian; pemantapan kualitas prasarana dan sarana wilayah; pengelolaan dan revitalisasi tata ruang sumber daya alam dan lingkungan hidup; penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih; pengembangan dan pembangunan kawasan strategis cepat tumbuh.*

Secara geografis, Provinsi Banten memiliki keuntungan berupa letak strategis sebagai penghubung antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, dan berbatasan langsung dengan Ibukota Negara DKI Jakarta. Dengan letak yang strategis ini, maka telah mendorong Banten berperan sebagai agen pembangunan (*development agent*) bagi pertumbuhan nasional, yaitu menghubungkan dua kutub potensi 80% (kapital dan SDM) secara nasional.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Provinsi Banten antara lain: penataan ruang dan lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial. Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka arah kebijakan pembangunan daerah jangka menengah 2012-2017, dititikberatkan pada pengentasan kemiskinan berbasis kemandirian, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pertanian dan kelautan berbasis unggulan, perluasan kesempatan lapangan kerja dan usaha baru, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan

serta penataan struktur pemerintah daerah menuju kemandirian masyarakat Banten.

Dengan memperhatikan amanat RPJPD Provinsi Banten 2005-2025 dan RPJMN 2010-2014, serta mempertimbangkan aspek potensi/kondisi aktual, dan permasalahan yang dihadapi, maka Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2012–2017 adalah:

***“Bersatu Mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera
Berlandaskan Iman dan Takwa”***

Memperhatikan Visi tersebut dan perubahan paradigma serta kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi Banten dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional, maupun global.

Penjabaran makna dari Visi Banten di atas adalah sebagai berikut :

Bersatu Mewujudkan :

Merupakan wujud betapa besarnya komitmen rakyat Banten untuk selalu menumbuhkembangkan suasana kemasyarakatan yang rukun, damai, dan harmonis antar seluruh pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, dan aliran atau golongan untuk secara bersama-sama mewujudkan rakyat Banten yang lebih sejahtera.

Rakyat Banten Sejahtera :

Merupakan cerminan dari suatu keadaan, dimana telah berkurangnya jumlah masyarakat miskin, meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat, terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan perekonomian serta ditemukannya jati diri masyarakat Banten yang maju dan mandiri.

Iman dan Taqwa :

Merupakan do'a kita bersama, yaitu sebagai persyaratan mutlak untuk dapat terwujudnya kehidupan yang agamis, serta untuk menjadikan masyarakat yang saleh dan taat pada tuntunan ajaran agama yang diyakini. Keberhasilan pembangunan pada bidang atau sektor apapun, tidak akan mendatangkan kemaslahatan dan keberkahan, tanpa dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut melalui efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, maka ditetapkan misi pembangunan Provinsi Banten, yang didalamnya mengandung gambaran tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2017.

MISI

RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 yang merupakan tahapan ketiga dari RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025, berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Banten dalam segala bidang, guna menyiapkan kemandirian masyarakat Banten. Hal tersebut akan dicapai dengan menciptakan aktivitas ekonomi yang efektif dan efisien, menekankan upaya penguatan suprastruktur pelayanan kesehatan dan pendidikan, melanjutkan pembangunan infrastruktur wilayah, memantapkan revitalisasi infrastruktur yang telah ada, meningkatkan produktivitas pertanian dengan memanfaatkan teknologi berkelanjutan, meningkatkan kerja sama antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan, meningkatkan kinerja pemerintahan daerah, menyusun perencanaan yang cerdas dan mampu menjawab masalah serta mengantisipasi peluang dan tantangan yang muncul secara cermat dan cerdas.

Kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan akan terus didorong. Kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas melalui pengembangan kegiatan utama (*core business*) berdasarkan potensi unggulan untuk mengurangi disparitas kesejahteraan antar wilayah. Hal ini dilakukan melalui pengembangan agribisnis, bisnis kelautan, industri manufaktur, jasa, dan pariwisata, yang ditunjang oleh pengembangan dunia usaha, investasi, infrastruktur dan kemampuan keuangan daerah.

Dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi juga dilakukan dengan mempercepat pembangunan infrastruktur bagi penyediaan energi termasuk listrik, serta memantapkan infrastruktur wilayah dalam rangka mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, dengan berprinsip pada *pro growth, pro poor, pro job, pro environment, pro public*, melalui peningkatan keberpihakan dalam penganggaran pada bidang pendidikan, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan, serta infrastruktur wilayah dan kawasan.

Dalam rangka pencapaian Visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut:

Misi Pertama, Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Mendukung Pengembangan Wilayah dan Kawasan yang Berwawasan Lingkungan, ditujukan untuk konektivitas pengembangan wilayah/kawasan guna percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Banten serta

meningkatkan layanan dasar masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan;

Misi Kedua, Pemantapan Iklim Investasi yang Kondusif untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, ditujukan untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;

Misi Ketiga, Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Religius, Cerdas dan Berdaya Saing dalam Kerangka Penguatan NKRI, ditujukan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, agamis dan berdaya saing;

Misi Keempat, Penguatan Semangat Kebersamaan Antar-Pelaku Pembangunan dan Sinergitas Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Selaras, Serasi dan Seimbang, ditujukan untuk mewujudkan Banten rukun damai, membangun kebersamaan yang sinergis antara pusat-daerah, beserta stakeholders dalam menjalankan peran dan fungsinya masing-masing secara terintegrasi membangun Banten;

Misi Kelima, Peningkatan Mutu dan Kinerja Pemerintahan Daerah yang Berwibawa Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih, ditujukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

Ke 5 (lima) misi tersebut dalam pencapaiannya harus dilandasi nilai-nilai agama dan budaya daerah, serta mempedomani prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan, sebagai berikut:

1. ***Good Governance*** (tata kelola pemerintahan), yaitu pengelolaan dan kepengurusan pemerintahan yang baik bebas Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme (KKN) untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang solid, bertanggung jawab, efektif dan efisien, dengan menjaga keserasian interaksi yang konstruktif di antara domain negara, swasta dan masyarakat;

2. **Integrity** (integritas), yaitu suatu kesatuan perilaku yang melekat pada prinsip-prinsip moral dan etika, terutama mengenai karakter moral dan kejujuran, yang dihasilkan dari suatu sistem nilai yang konsisten;
3. **Quality and accountability** (mutu dan akuntabilitas), yaitu suatu tingkatan kesempurnaan, merupakan karakteristik pribadi yang mampu memberikan hasil yang melebihi kebutuhan atau pun harapan, dan sebuah bentuk tanggungjawab untuk suatu tindakan, keputusan dan kebijakan yang telah mempertimbangkan mengenai aturan, pemerintahan dan implementasinya, dalam pandangan hukum dan tata kelola yang transparan;
4. **Pemerataan pembangunan yang berkeadilan**, yaitu upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan antarwilayah, dan kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat, melalui pemenuhan kebutuhan akses pelayanan sosial dasar termasuk perumahan beserta sarana dan prasarannya, serta memberikan kesempatan berusaha bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menanggulangi pengangguran dengan menyeimbangkan pengembangan ekonomi skala kecil, menengah, dan besar.
5. **Penggunaan data dan informasi yang terintegrasi** (satu data dan informasi banten) yang akurat, terbaharukan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen tersebut terdiri dari data dan informasi spasial (keruangan) dan a-spasial (non keruangan).

2.2. RENCANA STRATEGIS

Bappeda Provinsi Banten sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas. Untuk menghasilkan produk-produk perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas tersebut maka perlu didukung oleh sumber daya aparatur yang berkompeten, handal, professional dan memiliki integritas, sarana dan prasarana yang memadai, kerangka regulasi serta anggaran yang cukup. Sehingga disusun visi dan misi Bappeda Provinsi Banten yang akan dicapai melalui tujuan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukung. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD Provinsi Banten 2012-2017.

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan (Pasal 1 ayat (12) UU No. 25 Tahun 2004). Visi harus menggambarkan bagaimana wujud akhir perencanaan yang diinginkan oleh suatu daerah/organisasi pada akhir periode perencanaan. Visi memegang peranan penting dalam menentukan ke mana arah yang akan dituju oleh suatu daerah/organisasi pada masa mendatang.

Peran Bappeda Provinsi Banten diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah Provinsi Banten pada urusan perencanaan pembangunan dan penataan ruang. Seiring dengan upaya tersebut dan berpijak pada kedudukan, tugas pokok dan fungsinya serta isu strategis yang dihadapi dalam urusan perencanaan pembangunan dan penataan ruang dalam kurun waktu tahun 2012-2017 maka **Bappeda Provinsi Banten** menetapkan **Visi Tahun 2012-2017** adalah:

“PROFESIONAL DALAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH”

Makna yang terkandung dalam Visi Bappeda Provinsi Banten adalah sebagai berikut.

1. Profesional.

- a. Mampu dan berkualitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kelembagaan yang dilandasi oleh kerangka regulasi dan ketentuan organisasi;
- b. Mampu dan berkualitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan yang didukung oleh sumber daya aparatur yang kompeten;
- c. Mampu dan berkualitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan yang berorientasi pada peningkatan kinerja dan pelayanan publik.
- d. Melahirkan dokumen produk perencanaan pembangunan daerah yang terukur, jelas dan terpercaya.
- e. Produk dokumen yang dihasilkan dapat dilaksanakan secara logis dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah.

- a. Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang bermutu dan akuntabel;
- b. Perencanaan dan penganggaran pembangunan yang berdasarkan hasil pelaporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- c. Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang berdasarkan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang berdasarkan tahapan dan proses secara terkoordinasi dengan memperhatikan pendekatan partisipatif dan *Bottom up Planning*.

Visi Bappeda Provinsi Banten Tahun 2012-2017 tersebut dapat menjadi pilar utama dalam aspek perencanaan pembangunan guna mendukung pencapaian Visi Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017, yaitu:

“Bersatu Mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”.

Sebagai upaya untuk mencapai visi yang telah ditentukan tersebut, perlu ditetapkan misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang dimaksud.

Misi merupakan pernyataan dari ruang lingkup tugas pokok dan fungsi organisasi yang sarasanya secara operasional akan dicapai dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap tahunnya. Berkaitan dengan perumusan Misi Bappeda Provinsi Banten Tahun 2012-2017 tersebut, maka perlu diperhatikan relevansi dan kontribusi dalam dukungannya terhadap pencapaian Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017.

Dalam rangka mendukung pencapaian Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017, khususnya Misi Keempat dan Misi Kelima maka Visi Bappeda Provinsi Banten Tahun 2012-2017 **“Profesional Dalam Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah yang Implemetatif”**, yang dituangkan ke dalam 4 (empat) **Misi Bapeda Provinsi Banten 2012-2017** sebagai berikut.

- 1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah.**
- 2. Meningkatkan Mutu Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan yang berbasis akuntabilitas kinerja.**
- 3. Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi berbasis Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.**
- 4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur.**

A. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BAPPEDA PROVINSI BANTEN

Tujuan adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau apa yang akan dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan. Sedangkan **Sasaran** merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan atau merupakan tujuan antara. Ini berarti bahwa tujuan akan tercapai apabila sasaran bisa terpenuhi atau dengan kata lain **berhasil**.

Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh Bappeda Provinsi Banten Tahun 2012-2017 berdasarkan rumusan Misi Bappeda Provinsi Banten Tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut:

1. Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berbasis Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi.

Tujuannya adalah:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran.
- b. Menguatkan struktur hubungan kerjasama dan koordinasi antar sektor dan wilayah perencanaan baik pusat maupun daerah.

Sasarannya adalah:

- a. Meningkatnya kualitas penyusunan RTRW, RPJMD, RKPD dan KUA-PPAS.
- b. Menguatnya struktur hubungan kerjasama dan koordinasi antar sektor dan wilayah perencanaan, baik pusat maupun daerah yang diukur dari (indikator):

- 1) Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan di segala bidang sebagai pendukung dalam penyusunan RTRW, RPJMD, RKPD dan KUA-PPAS.
- 2) Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan pengendalian kerjasama pembangunan daerah.

2. Misi 2 : Meningkatkan Mutu Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan yang berbasis akuntabilitas kinerja.

Tujuannya adalah:

Meningkatkan dan mengembangkan sistem pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.

Sasarannya adalah:

Tercapainya kesesuaian antara muatan dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan daerah yang diukur dari (indikator): tersusunnya LKPJ, TAPKIN dan dokumen evaluasi perencanaan.

3. Misi 3 : Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi berbasis Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Tujuannya adalah:

Membangun dan meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan daerah secara optimal.

Sasarannya adalah:

Terbangunnya sistem jaringan data dan informasi, pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan

daerah yang diukur dari (indikator): tersusunnya Dokumen data statistik dan data spasial.

4. Misi 4 : Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur.

Tujuannya adalah:

- a. Meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencanaan.
- b. Penguatan struktur kelembagaan, peran dan kewenangan perencanaan dalam memantapkan ketatalaksanaan.

Sasarannya adalah:

- a. Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencanaan yang diukur dari (indikator):
 - 1) Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - 2) Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan.
- b. Menguatnya struktur kelembagaan, peran dan kewenangan perencanaan dalam memantapkan ketatalaksanaan yang diukur dari (indikator):
 - 1) Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan.
 - 2) Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke Luar Daerah.
 - 3) Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur.
 - 4) Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Banten

<i>MISI</i>	<i>TUJUAN</i>	<i>SASARAN</i>	<i>INDIKATOR SASARAN</i>	<i>TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN</i>				
				2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berbasis Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi.	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran.	Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.	RPJMD, RKPD dan KUA-PPAS	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok
	Menguatkan struktur hubungan kerjasama dan koordinasi antar sektor dan wilayah perencanaan baik pusat maupun daerah.	Menguatnya struktur hubungan kerjasama dan koordinasi antar sektor dan wilayah perencanaan, baik pusat maupun daerah.	1) Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan di segala bidang sebagai pendukung dalam penyusunan RPJMD, RKPD dan KUA-PPAS.. 2) Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			pengendalian kerjasama pembangunan daerah.					
Misi 2: Meningkatkan Mutu Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan yang berbasis akuntabilitas kinerja.	Meningkatkan dan mengembangkan sistem pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.	Tercapainya kesesuaian antara muatan dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan daerah.	LKPJ, TAPKIN dan dokumen evaluasi perencanaan	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok
Misi 3: Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi berbasis Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.	Membangun dan meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan daerah secara optimal.	Terbangunnya sistem jaringan data dan informasi, pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.	Dokumen data statistik dan data spasial.	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok
Misi 4: Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur.	Meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencana.	Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencana.	1) Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. 2) Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan.	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Penguatan struktur kelembagaan, peran dan kewenangan perencanaan dalam memantapkan ketatalaksanaan.	Menguatnya struktur kelembagaan, peran dan kewenangan perencanaan dalam memantapkan ketatalaksanaan.	1) Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan. 2) Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke Luar Daerah. 3) Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur. 4) Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian.	100%	100%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%	100%	100%

2.3. Program dan Kegiatan Tahun 2014

menjabarkan Visi, Misi, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan dalam menjawab isu dan permasalahan pembangunan, serta berangkat dari Aspek Pembangunan Daerah 2012-2017 yang juga sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2012-2017, maka selanjutnya dijabarkan operasionalisasi dari

upaya-upaya yang telah dirumuskan di atas dalam bentuk program pembangunan beserta indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode 2012-2017.

Berdasarkan Renstra Bappeda Provinsi Banten Tahun 2012 – 2017, pada tahun 2014 Bappeda Provinsi Banten melaksanakan 1 (satu) Urusan Wajib, 4 (empat) Bidang Urusan Pemerintah Daerah, 7 (tujuh) Program dan 22 (dua puluh dua) Indikasi Kegiatan yang akan di laksanakan oleh Bappeda Provinsi Banten tahun 2014.

Adapun program yang diarahkan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan
2. Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
3. Pengendalian Pembangunan Daerah
4. Kerjasama Pembangunan Daerah
5. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
6. Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
7. Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Sedangkan capaian program sesuai RPJMD 2012-2017 adalah sebagai berikut :

1. Program Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan
 - a. Capaian Program : Tercapaiannya ketersediaan regulasi dan dokumen rencana tata ruang wilayah (3 dok)
2. Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
 - a. Capaian Program : Tercapaiannya ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan (100%)
3. Pengendalian Pembangunan Daerah
 - a. Capaian Program : Tercapaiannya Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan (100%)

4. Kerjasama Pembangunan Daerah
 - a. Capaian Program : Tercapaiannya Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah (3 Dok)
5. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
 - a. Capaian Program : Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (100%)
 - b. Capaian Program : Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan (100%)
6. Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
 - a. Capaian Program : Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan (100%)
 - b. Capaian Program : Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke Luar Daerah (100%)
 - c. Capaian Program : Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur (100%)
 - d. Capaian Program : Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian (100%)
7. Penyediaan Data Pembangunan Daerah
 - a. Capaian Program : Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan (41 paket)

kegiatan – kegiatan yang mendukung tercapaiannya program tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
2. Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Perencanaan Anggaran Pembangunan Daerah
4. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Indagkop, Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata

5. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Agribisnis dan Bisnis Kelautan
6. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Wilayah
7. Perencanaan dan Pengendalian Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban
8. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Gender
9. Perencanaan dan Pengendalian SDM, Budaya dan Keagamaan
10. Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah
11. Perencanaan dan Pengendalian Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) Provinsi Banten
12. Pengendalian dan Evaluasi Program APBD
13. Pengendalian dan Evaluasi Program APBN dan Dana Lainnya
14. Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan
15. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
16. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
17. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
18. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
19. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
20. Peningkatan Kapasitas Aparatur
21. Peningkatan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan
22. Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

Anggaran kegiatan pada tahun 2014, sebagai berikut :

Tabel 2.1
Anggaran kegiatan Tahun 2014

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	
		MURNI	PERUBAHAN
I	Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan	1.049.025.000,00	1.199.025.000,00
1	Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1.049.025.000,00	1.199.025.000,00
II	Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	10.271.975.000,00	11.671.975.000,00
2	Perencanaan Pembangunan Daerah	2.471.000.000,00	2.671.000.000,00
3	Perencanaan Anggaran Pembangunan Daerah	1.200.000.000,00	1.700.000.000,00
4	Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Indagkop, Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata	800.000.000,00	850.000.000,00
5	Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Agribisnis dan Bisnis Kelautan	800.000.000,00	950.000.000,00
6	Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Wilayah	1.250.975.000,00	1.400.975.000,00
7	Perencanaan dan Pengendalian Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban	750.000.000,00	900.000.000,00
8	Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Gender	900.000.000,00	950.000.000,00
9	Perencanaan dan Pengendalian SDM, Budaya dan Keagamaan	800.000.000,00	850.000.000,00
10	Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	900.000.000,00	950.000.000,00
11	Perencanaan dan Pengendalian Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) Provinsi Banten	400.000.000,00	450.000.000,00
III	Pengendalian Pembangunan Daerah	2.492.000.000,00	2.847.000.000,00
12	Pengendalian dan Evaluasi Program APBD	1.737.000.000,00	1.992.000.000,00
13	Pengendalian dan Evaluasi Program APBN dan Dana Lainnya	755.000.000,00	855.000.000,00
IV	Kerjasama Pembangunan Daerah	1.000.000.000,00	1.200.000.000,00
14	Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan	1.000.000.000,00	1.200.000.000,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	
		MURNI	PERUBAHAN
V	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1.950.000.000,00	1.985.000.000,00
15	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	500.000.000,00	500.000.000,00
16	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1.450.000.000,00	1.485.000.000,00
VI	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur	9.437.000.000,00	10.867.527.500,00
17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	2.385.280.000,00	3.469.212.500,00
18	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.985.683.500,00	2.135.790.500,00
19	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	4.037.536.500,00	4.578.024.500,00
20	Peningkatan Kapasitas Aparatur	654.500.000,00	684.500.000,00
21	Peningkatan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	374.000.000,00	406.472.500,00
VII	Penyediaan Data Pembangunan Daerah	800.000.000,00	850.000.000,00
22	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	800.000.000,00	850.000.000,00
	JUMLAH	27.000.000.000,00	31.000.000.000,00

Rencana Tolok Ukur Kinerja tahun 2014 kegiatan Bappeda Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rencana tolok ukur Kinerja tahun 2014

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target	
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6
	Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan				
1	Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1. Evaluasi Capaian Kinerja SKPD Mitra Subid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tahun 2013	Evaluasi Capaian Kinerja SKPD Mitra Subid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tahun 2013	1 Dokumen	1 Dokumen
		2. Verifikasi Renja SKPD Mitra Subid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tahun 2015	Verifikasi Renja SKPD Mitra Subid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tahun 2015	2 Dokumen	2 Dokumen

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target	
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6
		3. Verifikasi Renja Perubahan SKPD Mitra Subid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tahun 2014	Verifikasi Renja Perubahan SKPD Mitra Subid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tahun 2014	1 Dokumen	1 Dokumen
		4. Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Nasional	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Nasional	2 Dokumen	2 Dokumen
		5. Koordinasi dan Konsultasi Penataan Ruang	Koordinasi dan Konsultasi Penataan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen
		6. Penyelenggaraan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Banten	Penyelenggaraan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Banten	2 Dokumen	2 Dokumen
		7. Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030	Evaluasi Rencana Penataan Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030	1 Dokumen	1 Dokumen
		8. Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Provinsi Banten	Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Provinsi Banten	1 Dokumen	1 Dokumen
		9. Pengembangan Kawasan Metropolitan Provinsi Banten	Pengembangan Kawasan Metropolitan Serang-Cilegon (Seragon) Provinsi Banten	2 Dokumen	2 Dokumen
		10. Koordinasi Perencanaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Koordinasi Perencanaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	1 Dokumen
		11. Koordinasi Pengelolaan DAS Provinsi Banten	Koordinasi Pengelolaan DAS Provinsi Banten	1 Dokumen	1 Dokumen

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target	
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6
		12. Pengendalian dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten (Monitoring dan Evaluasi Penataan Ruang)	Pengendalian dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten (Monitoring dan Evaluasi Penataan Ruang)	1 Dokumen	1 Dokumen
			Pengembangan Wilayah Perkotaan di Provinsi Banten		1 Dokumen
			Laporan Hasil Kegiatan		1 Dokumen
	Perencanaan pembangunan;				
	Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah				
	Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2015	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2015	4 Dokumen	4 Dokumen
		2. Forum Konsultasi Publik RKPD Provinsi Banten Tahun 2015	Forum Konsultasi Publik RKPD Provinsi Banten Tahun 2015	1 Dokumen	1 Dokumen
		3. Verifikasi Rancangan Renja SKPD Provinsi Banten Tahun 2015	Verifikasi Rancangan Renja SKPD Provinsi Banten Tahun 2015	1 Dokumen	1 Dokumen
		4. Verifikasi Rancangan Akhir Renja SKPD Provinsi Banten Tahun 2015	Verifikasi Rancangan Akhir Renja SKPD Provinsi Banten Tahun 2015	1 Dokumen	1 Dokumen
		5. Pra Musrenbang RKPD Provinsi Banten Tahun 2015	Pra Musrenbang RKPD Provinsi Banten Tahun 2015	1 Dokumen	1 Dokumen
		6. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Provinsi Banten Tahun 2014	Musrenbang RKPD Provinsi Banten Tahun 2015	1 Dokumen	1 Dokumen

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target	
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6
		7. Penyusunan Dokumen Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2014	Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2014	3 Dokumen	3 Dokumen
		8. Verifikasi Perubahan Renja SKPD Provinsi Banten Tahun 2014	Verifikasi Perubahan Renja SKPD Provinsi Banten Tahun 2014	1 Dokumen	1 Dokumen
		9. Konsultasi Dan Rekomendasi Raperda RPJMD Kabupaten / Kota	Konsultasi dan Rekomendasi Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen
			Penyusunan Rapergub Tentang Juknis Pelaksanaan Forum Skpd Provisi Banten		1 Dokumen
	Perencanaan Anggaran Pembangunan Daerah	1. Tata Cara Penyusunan DRPK SKPD TA. 2015	Tata Cara Penyusunan DRPK SKPD Tahun Anggaran 2015	1 Dokumen	1 Dokumen
		2. Verifikasi DRPK TA. 2015	Verifikasi DRPK SKPD TA. 2015	1 Dokumen	1 Dokumen
		3. Sosialisasi Penyusunan Usulan Kegiatan Dan Pendanaan Pembangunan Daerah (UKPPD) Tahun 2015	Sosialisasi Penyusunan Usulan Kegiatan dan Pendanaan Pembangunan Daerah (UKPPD) Tahun 2015	1 Dokumen	1 Dokumen
		4. Fasilitasi Musrenbangnas	Fasilitasi Musrenbangnas	1 Dokumen	1 Dokumen
		5. Penyusunan KUA Dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2015	Penyusunan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2015	2 Dokumen	2 Dokumen

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target	
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6
		6. Penyusunan KUA Dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran. 2014	Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD TA. 2014	2 Dokumen	2 Dokumen
		7. Fasilitasi Koordinasi Dan Konsultasi Perencanaan Penganggaran Pembangunan	Fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan Penganggaran Pembangunan	1 Dokumen	1 Dokumen
			Verifikasi DRPK Bantuan Keuangan Ke Kabupaten/Kota TA. 2015		1 Dokumen
			Penyusunan Rancangan PERGUB Pedoman Perencanaan Bantuan Keuangan Ke Kabupaten/Kota Tahun 2015		2 Dokumen
	Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Indagkop, Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata	1. Evaluasi Renja Mitra 2013	Evaluasi Renja Mitra 2013	1 Dokumen (3 buku) 1 Kali Kegiatan	1 Dokumen (3 buku) 1 Kali Kegiatan
		2. Verifikasi Mitra 2015	Verifikasi Renja Mitra 2015	1 Dokumen (3 buku) 1 Kali Kegiatan	1 Dokumen (3 buku) 1 Kali Kegiatan
		3. Verifikasi Renja Perubahan Mitra 2014	Verifikasi Renja Perubahan Mitra 2014	1 Dokumen (8 buku) 1 Kali Kegiatan	1 Dokumen (8 buku) 1 Kali Kegiatan
		4. Koordinasi Perencanaan Lintas Sektor Dan Wilayah SKPD Mitra Indagkop,Investasi, Kebudayaan Dan Pariwisata	Koordinasi Perencanaan Lintas Sektor dan Wilayah Mitra	1 Dokumen (8 buku) 1 Kali Kegiatan	1 Dokumen (8 buku) 1 Kali Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target	
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6
		5. Koordinasi Pengendalian Perencanaan Renja Mitra Subid 2015	Koordinasi Pengendalian Perencanaan Renja Mitra Subid 2015	1 Dokumen (3 buku) 1 Kali Kegiatan	1 Dokumen (3 buku) 1 Kali Kegiatan
		6. Penyusunan Strategi Peningkatan Daya Saing Investasi Wilayah Serang dan Cilegon	Penyusunan Strategi Peningkatan Daya Saing Investasi Wilayah Serang dan Cilegon	1 Dokumen 1 Kali Kegiatan	1 Dokumen 1 Kali Kegiatan
		7. Evaluasi Perkembangan Perekonomian Banten	Evaluasi Perkembangan Perekonomian Banten	1 Dokumen (9 buku) 1 Kali Kegiatan	1 Dokumen (9 buku) 1 Kali Kegiatan
		8. Koordinasi Pelaksanaan PT Jamkrida	Koordinasi Pelaksanaan PT Jamkrida	1 Dokumen (8 buku) 1 Kali Kegiatan	1 Dokumen (8 buku) 1 Kali Kegiatan
		9. Koordinasi Sektor Perindustrian dan Perdagangan Dalam Menghadapi Pasar Bebas ASEAN (AFTA) 2015	Koordinasi Perdagangan Dalam Menghadapi Pasar Bebas ASEAN (AFTA) 2015	1 Dokumen (1 Paket) 1 Kali Kegiatan	1 Dokumen (1 Paket) 1 Kali Kegiatan
		10. Koordinasi Sektor IKM dan UMKM Se Provinsi Banten	Koordinasi Sektor IKM dan UMKM se Provinsi Banten	1 Dokumen (8 buku) 1 Kali Kegiatan	1 Dokumen (8 buku) 1 Kali Kegiatan
	Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Agribisnis dan Bisnis Kelautan	1. Evaluasi Kinerja OPD Mitra Subid Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2013	Evaluasi Kinerja OPD Mitra Subid Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2013	1 dokumen	1 dokumen
		2. Verifikasi Rancangan Rencana Kerja OPD Mitra Subid Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2015	Verifikasi Rancangan Rencana Kerja OPD Mitra Subid Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2015	2 dokumen	2 dokumen

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target	
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6
		3. Verifikasi Rancangan Rencana Kerja Perubahan OPD Mitra Subid Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2015	Verifikasi Rancangan Rencana Kerja Perubahan OPD Mitra Subid Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2015	1 dokumen	1 dokumen
		4. Fasilitasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2015	Fasilitasi Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional Bidang Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2015	1 dokumen	1 dokumen
		5. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian Tahun 2014	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian Tahun 2014	1 dokumen	1 dokumen
		6. Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi	Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi	1 dokumen	1 dokumen
		7. Koordinasi Pelaksanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Koordinasi Pelaksanaan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan	1 dokumen	1 dokumen
		8. Koordinasi Pengembangan Kawasan Minapolitan	Koordinasi Pengembangan Kawasan Minapolitan	3 dokumen	3 dokumen
		9. Koordinasi Kawasan Agropolitan dan Sentra Produksi	Koordinasi Kawasan Agropolitan dan Sentra Produksi	2 dokumen	2 dokumen
		10. Fasilitasi Pengembangan Agribisnis	Fasilitasi Pengembangan Agribisnis	3 dokumen	3 dokumen

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target	
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6
		11. Pemantapan Kemandirian Pangan	Pemantapan Kemandirian Pangan	2 dokumen	2 dokumen
	Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Wilayah	1. Evaluasi Capaian Kinerja SKPD Mitra Infrastruktur Wilayah Tahun 2013	Evaluasi Capaian Kinerja SKPD Mitra Infrastruktur Wilayah Tahun 2013	1 Dokumen	1 Dokumen
		2. Verifikasi Renja SKPD Mitra Bidang Infrastruktur Wilayah Tahun 2015	Verifikasi Renja SKPD Mitra Bidang Infrastruktur Wilayah Tahun 2015	1 Dokumen	1 Dokumen
		3. Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Penataan Ruang Dan Prasarana Wilayah	Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Penataan Ruang Dan Prasarana Wilayah	1 Dokumen Prosiding	1 Dokumen Prosiding
		4. Verifikasi Renja Perubahan SKPD Mitra Bidang Infrastruktur Wilayah Tahun 2014	Verifikasi Renja Perubahan SKPD Mitra Bidang Infrastruktur Wilayah Tahun 2014	1 Dokumen	1 Dokumen
		5. Sinergitas Perencanaan Daerah Dan Nasional	Sinergitas Perencanaan Daerah Dan Nasional	1 Dokumen	1 Dokumen
		6. Koordinasi Perencanaan Program Bidang Perumahan Dan Permukiman	Koordinasi Perencanaan Program Bidang Perumahan Dan Permukiman	1 Dokumen	1 Dokumen
		7. Koordinasi Perencanaan Program Bidang Sumber Daya Air	Koordinasi Perencanaan Program Bidang Sumber Daya Air	1 Dokumen	1 Dokumen
		8. Lokakarya Perencanaan Penanganan Sumber Daya Air Dan Permukiman	Lokakarya Perencanaan Penanganan Sumber Daya Air Dan Permukiman	1 Dokumen Prosiding	1 Dokumen Prosiding

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target	
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6
		9. Koordinasi Perencanaan Program Bidang Prasarana Transportasi	Koordinasi Perencanaan Program Bidang Prasarana Transportasi	1 Dokumen	1 Dokumen
		10. Lokakarya Perencanaan Penanganan Infrastruktur Wilayah	Lokakarya Perencanaan Penanganan Infrastruktur Wilayah	1 Dokumen Prosiding	1 Dokumen Prosiding
		11. Koordinasi Perencanaan Dak Bidang Infrastruktur Wilayah	Koordinasi Perencanaan DAK Bidang Infrastruktur Wilayah	1 Dokumen	1 Dokumen
		12. Koordinasi Perencanaan Program AMPL/PPSP	Koordinasi Perencanaan Program AMPL/PPSP	1 Dokumen	1 Dokumen
		13. Penjaminan Kualitas Dokumen PPSP Kab/Kota Tahun 2014	Penjaminan Kualitas Dokumen PPSP Kab/Kota Tahun 2014	1 Dokumen	1 Dokumen
		14. Workshop Fasilitasi Penyusunan SSK Dan MPS Kab/Kota	Workshop Fasilitasi Penyusunan SSK Dan MPS Kab/Kota	1 Dokumen Prosiding	1 Dokumen Prosiding
		15. Penyusunan Data Dan Informasi Bidang Infrastruktur Wilayah	Penyusunan Data Dan Informasi Bidang Infrastruktur Wilayah	1 Dokumen	1 Dokumen
		16. Analisa Pencapaian Target Kinerja Pembangunan Bidang Infrastruktur Wilayah	Analisa Pencapaian Target Kinerja Pembangunan Bidang Infrastruktur Wilayah	1 Dokumen	1 Dokumen
		17. Analisa Perkembangan Infrastruktur Jalan Mendukung Kawasan Strategis Prioritas	Analisa Perkembangan Infrastruktur Jalan Mendukung Kawasan Strategis Prioritas	1 Dokumen	1 Dokumen

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target	
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6
		18. Study Kebutuhan Infrastruktur Pada Kawasan Strategis Bayah Dan Cibaliung	Study Kebutuhan Infrastruktur Pada Kawasan Strategis Bayah Dan Cibaliung	1 Dokumen Kajian	1 Dokumen Kajian
		19.	Rakor Persiapan Penyusunan Road map sanitasi Prov. Banten		2 Dokumen
	Perencanaan dan Pengendalian Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban	1. Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Renja SKPD Lingkup Bidang Pemerintahan Tahun 2013	Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Renja SKPD Lingkup Bidang Pemerintahan Tahun 2013	1 Dokumen	1 Dokumen
		2. Verifikasi Rancangan Renja SKPD Lingkup Bidang Pemerintahan Tahun 2015	Verifikasi Rancangan Renja SKPD Lingkup Bidang Pemerintahan Tahun 2015	2 Dokumen	2 Dokumen
		3. Verifikasi Renja Perubahan SKPD Lingkup Bidang Pemerintahan	Verifikasi Renja Perubahan SKPD Lingkup Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen
		4. Rapat Koordinasi SKPD Lingkup Bidang Pemerintahan	Rapat Koordinasi SKPD Lingkup Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen
		5. Koordinasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah Lingkup Bidang Pemerintah	Koordinasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah Lingkup Bidang Pemerintah	1 Dokumen	1 Dokumen
		6. Rakor Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Rakor Aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi	1 Dokumen	1 Dokumen

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target	
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6
		7. Penyusunan Laporan Aksi Daerah Mendukung Pencapaian Sasaran Program Inpres 1 Tahun 2012	Penyusunan Laporan Aksi Daerah Mendukung Pencapaian Sasaran Program Inpres 2 Tahun 2014	4 Dokumen	4 Dokumen
		8. Rakor Penyusunan Program Kegiatan Hak Asazi Manusia (HAM)	Rakor Penyusunan Program Kegiatan Hak Asazi Manusia (HAM)	1 Dokumen	1 Dokumen
		9. Penyusunan Laporan Rencana Aksi Daerah Mendukung Pencapaian Sasaran Program Inpres 3 Tahun 2010	Penyusunan Laporan Rencana Aksi Daerah Mendukung Pencapaian Sasaran Program Inpres 3 Tahun 2010	4 Dokumen	4 Dokumen
		10.	Rakor Evaluasi Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014		1 Dokumen
	Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Gender	1. Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Renja SKPD Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2013	Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Renja SKPD Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2013	1 Dok	1 Dok
		2. Verifikasi Rancangan Renja SKPD Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2015	Verifikasi Rancangan Renja SKPD Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2015	2 Dok	2 Dok
		3. Verifikasi Renja Perubahan SKPD Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2014	Verifikasi Renja Perubahan SKPD Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2014	1 Dok	1 Dok

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target	
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6
		4. Koordinasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional Daerah Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2015	Koordinasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional Daerah Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2015	1 Dok	1 Dok
		5. Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran PUHA	Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran PUHA	1 Dok	1 Dok
		6. Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran PUG	Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran PUG	1 Dok	1 Dok
		7. Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran Penanggulangan HIV/AIDS Dan Narkoba	Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran Penanggulangan HIV/AIDS Dan Narkoba	1 Dok	1 Dok
		8. Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Kab/Kota Sehat	Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Kab./Kota Sehat	1 Dok	1 Dok
		9. Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran Program Kelangsungan Hidup Perkembangan Perlindungan Ibu Dan Anak	Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran Program Kelangsungan Hidup Perkembangan Perlindungan Ibu Dan Anak (KHPPA)	1 Dok	1 Dok
	Perencanaan dan Pengendalian SDM, Budaya dan Keagamaan	1. Evaluasi Renja SKPD Mitra Tahun 2013	Evaluasi Renja SKPD Tahun 2013	1 Dokumen	1 Dokumen
		2. Verifikasi Renja SKPD Mitra Tahun 2015	Verifikasi Renja SKPD Mitra Tahun 2015	2 Dokumen	2 Dokumen

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target	
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6
		3. Verifikasi Renja Perubahan SKPD Mitra Tahun 2014	Verifikasi Renja Perubahan SKPD Mitra Tahun 2014	1 Dokumen	1 Dokumen
		4. Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang SDM Tahun 2015	Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang SDM Tahun 2015	1 Dokumen	1 Dokumen
		5. Rakor Bidang Sosmas	Rakor Bidang Sosmas	1 Dokumen	1 Dokumen
		6. Fasilitasi Koordinasi Relevansi Pendidikan dan Ketenagakerjaan	Fasilitasi Koordinasi Relevansi Pendidikan dan Ketenagakerjaan	1 Dokumen	1 Dokumen
		7. Pemetaan Pengembangan Daya Saing SDM	Pemetaan Pengembangan Daya Saing SDM	1 Dokumen	1 Dokumen
		8. Peningkatan Akses Pendidikan Kejuruan di Kawasan Strategis dan Perbatasan	Peningkatan Akses Pendidikan Kejuruan di Kawasan Strategis dan Perbatasan	1 Dokumen	1 Dokumen
	Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	1. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program-Program Penanggulangan Kemiskinan	Pengendalian Dan Evaluasi Program-Program Penanggulangan Kemiskinan	11 Dokumen	11 Dokumen
		2. Rapat Koordinasi Penanggulangan kemiskinan Provinsi Banten Tahun 2014	Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Prov. Banten Tahun 2014	1 Dokumen	1 Dokumen
		3. Rapat Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat	Rapat Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen
		4. Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) dan JAMSOSRATU	Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dan JAMSOSRATU	1 Dokumen	1 Dokumen

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target	
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6
		5. Penyusunan Rencana Kerja Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015	Penyusunan Rencana Kerja Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015	16 Dokumen	16 Dokumen
		6. Pelatihan Pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan	Pelatihan Pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan	1 Dokumen	1 Dokumen
		7. Penyusunan Dokumen Program Pembangunan Perdesaan Terpadu (P3T) Tahun 2015	Penyusunan Dokumen Program Pembangunan Perdesaan Terpadu (P3T) Tahun 2015	1 Dokumen	1 Dokumen
		8. Monitoring dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan	Monitoring Dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan	1 Dokumen	1 Dokumen
		9. Penyusunan Peraturan Gubernur Banten tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017	Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Banten Tahun 2012 - 2017	1 Dokumen	1 Dokumen
		10.	Penyusunan Laporan Percepatan Pencapaian Target MDGs Provinsi Banten		7 Dokumen
		11.	Study Komparasi untuk Pergub Penanggulangan Kemiskinan		1 Dokumen

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target	
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6
	Perencanaan dan Pengendalian Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan	1. Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Tim Kerja Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Provinsi Banten	Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Tim kerja Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan ekonomi Indonesia Provinsi Banten	1 Dokumen	1 Dokumen
		2. Penyusunan Kerangka Pengembangan Regulasi KP3EI Banten	Penyusunan Kerangka Pengembangan Regulasi KP3EI Banten	1 Dokumen	1 Dokumen
		3. Penyusunan Kerangka Pengembangan Konektivitas KP3EI Banten	Penyusunan Kerangka Pengembangan Konektivitas KP3EI	1 Dokumen	1 Dokumen
		4. Penyusunan Kerangka Pengembangan SDM dan IPTEK KP3EI Banten	Penyusunan Kerangka Pengembangan SDM dan IPTEK KP3EI Provinsi Banten	1 Dokumen	1 Dokumen
		5.	Fasilitasi Kepengurusan KPI Di Provinsi Banten		1 Dokumen
	Pengendalian Pembangunan Daerah				
	Pengendalian dan Evaluasi Program APBD	1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Banten Tahun 2013	Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Banten Tahun 2013	1 Dokumen (40 buku)	1 Dokumen (40 buku)
		2. Penyusunan LKPj Gubernur Banten Tahun 2012	Penyusunan LKPj Gubernur Banten Tahun 2013	1 Dokumen (200 buku)	1 Dokumen (200 buku)

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target	
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6
		3. Evaluasi Kebijakan Rencana Pembangunan Kab/Kota Tahun 2013	Evaluasi Kebijakan Rencana Pembangunan Kab/Kota Tahun 2013	1 Dokumen (50 buku)	1 Dokumen (50 buku)
		4. Penyusunan TAPKIN dan IKU Provinsi Banten Tahun 2014	Penyusunan TAPKIN dan IKU Provinsi Banten Tahun 2014	1 Dokumen (80 buku)	1 Dokumen (80 buku)
		5. Penyusunan Pelaporan Program Triwulanan APBD Provinsi Banten Tahun 2014	Penyusunan Pelaporan Program Triwulanan APBD Provinsi Banten TA. 2014	4 Dokumen (80 buku)	4 Dokumen (80 buku)
		6. Pemantauan Hasil Pelaksanaan APBD Provinsi Banten TA. 2014	Pemantauan Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Banten Tahun 2014	2 Dokumen (20 buku)	2 Dokumen (20 buku)
		7. Verifikasi Pengendalian Capaian Kinerja Program APBD Provinsi Banten Tahun 2014	Verifikasi Pengendalian Capaian Kinerja Program APBD Provinsi Banten Tahun 2014	1 Dokumen (50 buku)	1 Dokumen (50 buku)
		8. Evaluasi RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012 - 2017	Evaluasi RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017	1 Dokumen (50 buku)	1 Dokumen (50 buku)
		9.	Sosialisasi Pedoman Pengendalian dan evaluasi Rencana Tahun 2015		1 Dokumen (50 Buku)
		10.	Kajian Indikator Kinerja Utama SKPD Provinsi Banten		1 Dokumen
	Pengendalian dan Evaluasi Program APBN dan Dana Lainnya	1. Pengendalian Dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan APBN 2014	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun 2014	8 Dokumen (120 Buku)	8 Dokumen (120 Buku)

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target	
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6
		2. Pengendalian Dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan DAK 2014	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan DAK Tahun 2014	4 Dokumen (80 Buku)	4 Dokumen (80 Buku)
		3. Pengendalian Dan Evaluasi Hasil Pemantauan Kinerja Pelaksanaan Renc. Pemb. Daerah Sumber Dana APBN Dan Dana Lainnya Tahun 2014	Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pemantauan Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Sumber Dana APBN dan Dana Lainnya Tahun 2014	2 Dokumen (40 Buku)	2 Dokumen (40 Buku)
	Kerjasama Pembangunan Daerah				
	Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan	1. Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Renja SKPD Lingkup Tata Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan Daerah Tahun 2013	Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Renja SKPD lingkup Tata Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan Daerah Tahun 2013	1 Dokumen	1 Dokumen
		2. Verifikasi Rancangan Renja Tata Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan Tahun 2015	Verifikasi Rancangan Renja Tata Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan Daerah Tahun 2015	3 Dokumen	3 Dokumen
		3. Rakor Kerjasama Pembangunan Lintas Wilayah dan Sektor Provinsi Banten Tahun 2014	Rakor Kerjasama Pembangunan Lintas Wilayah dan sektor Provinsi Banten Tahun 2014	1 Dokumen	1 Dokumen
		4. Evaluasi Musrenbang Regional Se Jawa-Bali	Evaluasi Musrenbang Regional se- Jawa Bali	3 Dokumen	3 Dokumen

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target	
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6
		5. Koordinasi Tata Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan	Koordinasi Tata Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan	1 Dokumen	1 Dokumen
		6. Koordinasi Perencanaan Kerjasama Antar Kab/Kota	Koordinasi Perencanaan Kerjasama antar Kab/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen
		7. Koordinasi Penyiapan Kerjasama Pemerintah Swasta	Koordinasi Penyiapan Kerjasama Pemerintah Swasta	1 Dokumen	1 Dokumen
		8. Koordinasi Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS)	Koordinasi Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS)	1 Dokumen	1 Dokumen
		9. Koordinasi Perencanaan Reformasi dan Birokrasi	Koordinasi Perencanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1 Dokumen
		10.	Koordinasi perencanaan Desa Perbatasan Terpadu Banten - Jawa Barat		1 Dokumen
		11.	Koordinasi Perencanaan Kerjasama SERAGON		1 Dokumen
		12.	Penyusunan Renstra SERAGON		1 Dokumen

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target	
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6
	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;				
	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah				
	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	1. Penyusunan Dokumen Evaluasi LRA, Neraca dan CaLK SKPD BAPPEDA Provinsi Banten TA. 2013	Penyusunan Dokumen Evaluasi LRA, Neraca dan Calk SKPD Bappeda Provinsi Banten TA. 2013	1 Dokumen	1 Dokumen
		2. Penyusunan Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Anggaran Internal Kegiatan SKPD Bappeda Provinsi Banten TA 2014	Penyusunan Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Anggaran Internal Kegiatan SKPD Bappeda Provinsi Banten TA. 2014	1 Dokumen	1 Dokumen
		3. Penyusunan Verifikasi Kode Rekening anggaran dan Penyesuaian Tarif Harga Satuan sesuai Standar Satuan Harga (SSH) pada Kegiatan Bappeda Provinsi Banten TA. 2014	Penyusunan Verifikasi Kode Rekening Anggaran dan Penyesuaian Tarif Harga Satuan sesuai Standar Biaya Umum (SBU) pada kegiatan Bappeda Provinsi Banten TA. 2014	1 Dokumen	1 Dokumen

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target	
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6
		4. Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi dan Pencocokan Data Akuntansi (SP2D) Penyerapan Anggaran Kegiatan pada SKPD Bappeda Provinsi Banten TA. 2014	Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi dan pencocokan Data Akuntansi (SP2D) Penyerapan Anggaran Kegiatan pada SKPD Bappeda Provinsi Banten TA. 2014	1 Dokumen	1 Dokumen
		5. Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi dan Pencocokan Data Aset dan Inventarisasi Barang Persediaan pada SKPD BAPPEDA Provinsi Banten	Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi dan pencocokan Data Aset dan Inventarisasi Barang persediaan pada SKPD Bappeda Provinsi Banten	1 Dokumen	1 Dokumen
		6. Penyusunan Dokumen SPP, SPM, SP2D dan SPJ Kegiatan Bappeda Provinsi Banten TA 2014	Penyusunan Dokumen SPP, SPM, SP2D, dan SPJ Kegiatan Bappeda Provinsi Banten TA. 2014	1 Dokumen	1 Dokumen
		7. Penyusunan Dokumen LRA, Neraca dan CaLK Laporan Akuntabilitas Kegiatan SKPD Bappeda Provinsi Banten TA. 2014	Penyesuaian Dokumen LRA, Neraca dan Calk Laporan Akuntabilitas Kegiatan SKPD BAPPEDA Provinsi Banten TA. 2014	1 Dokumen	1 Dokumen
		8. Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Inventarisasi Barang/Jasa Aset Kegiatan SKPD Bappeda Provinsi Banten TA 2014	Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Inventarisasi Barang/Jasa (Aset) Kegiatan SKPD Bappeda Provinsi Banten TA. 2014	1 Dokumen	1 Dokumen

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target	
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6
		9. Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi Data Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Kegiatan Bappeda Provinsi Banten Sumber Dana APBN TA. 2014 Periode TW I; TW II; TW III; TW IV	Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi dan Sistem Akuntabilitas Instansi (SAI) Kegiatan Bappeda Provinsi Banten Sumber Dana APBN TA. 2014 Priode TW I, TW II, TW III, dan TW IV	1 Dokumen	1 Dokumen
		10. Penyusunan Dokumen Neraca, LRA dan CaLK Kegiatan Sumber Dana APBN Satker Bappeda Provinsi Banten TA. 2014 Semester I dan Semester II	Penyusunan Dokumen Neraca, LRA dan Calk Kegiatan Kegiatan sumber Dana APBN Satker Bappeda Provinsi Banten TA. 2014 Semester I dan II	1 Dokumen	1 Dokumen
		11. Penyusunan Dokumen Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Kegiatan BAPPEDA Provinsi Banten TA. 2014	Penyusunan Dokumen Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Kegiatan Bappeda Provinsi Banten TA. 2014	1 Dokumen	1 Dokumen
		12. Penyusunan Dokumen Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kegiatan BAPPEDA Provinsi Banten TA. 2014	Penyusunan Dokumen Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kegiatan Bappeda Provinsi Banten TA. 2014	1 Dokumen	1 Dokumen
	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1. Penyusunan LAKIP Bappeda Provinsi Banten Tahun 2013	Penyusunan LAKIP Bappeda Provinsi Banten 2013	1 Dokumen	1 Dokumen
		2. Penyusunan LKPJ Bappeda Provinsi Banten Tahun 2013	Penyusunan LKPJ Bappeda Provinsi Banten 2013	1 Dokumen	1 Dokumen

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target	
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6
		3. Penyusunan LPPD Bappeda Provinsi Banten Tahun 2013	Penyusunan LPPD Bappeda Provinsi Banten 2013	1 Dokumen	1 Dokumen
		4. Penyusunan Evaluasi Semesteran Kegiatan Bappeda Provinsi Banten Tahun 2014	Penyusunan Evaluasi Semesteran Kegiatan Bappeda Tahun 2014	1 Dokumen	1 Dokumen
		5. Penyusunan Evaluasi Kegiatan Bappeda Akhir Tahun 2014	Penyusunan Evaluasi Kegiatan Bappeda Akhir Tahun 2014	1 Dokumen	1 Dokumen
		6. Penyusunan TAPKIN dan IKU Bappeda Provinsi Banten Tahun 2014	Penyusunan TAPKIN dan IKU Bappeda Provinsi Banten 2014	1 Dokumen	1 Dokumen
		7. Penyusunan RENJA Bappeda Provinsi Banten Tahun 2015	Penyusunan RENJA Bappeda Provinsi Banten 2015	1 Dokumen	1 Dokumen
		8. Penyusunan Rencana Operasional Kegiatan Tahun 2015	Penyusunan Rencana Operasional Kegiatan Tahun 2015	1 Dokumen	1 Dokumen
		9. Penyusunan DRPK Tahun 2015	Penyusunan DRPK Tahun 2015	1 Dokumen	1 Dokumen
		10. Penyusunan Kerangka Logis dan Perubahan Penganggaran Bappeda Provinsi Banten Tahun 2014	Penyusunan Kerangka Logis dan Perubahan Penganggaran Bappeda Tahun Anggaran 2014	1 Dokumen	1 Dokumen
		11. Penyusunan Kerangka Logis dan Penganggaran Bappeda Provinsi Banten Tahun 2015	Penyusunan Kerangka Logis dan Penganggaran Bappeda Tahun Anggaran 2015	1 Dokumen	1 Dokumen
		12. Penyusunan Usulan Standar Satuan Harga Bappeda Provinsi Banten	Penyusunan Standar Satuan Harga	1 Dokumen	1 Dokumen

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target	
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6
		13. Penyusunan Laporan Bulanan Kegiatan Bappeda Provinsi Banten Tahun 2014	Penyusunan Laporan Bulanan Kegiatan Bappeda Provinsi Banten Tahun 2014	12 Dokumen	12 Dokumen
		14. Penyusunan Laporan Barang/Jasa Kegiatan Bappeda Provinsi Banten	Penyusunan Laporan Barang/Jasa Kegiatan Bappeda Provinsi Banten	12 Dokumen	12 Dokumen
		15. Forum Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Banten	Forum Perencanaan Pembangunan Bappeda se Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen
		16. Forum PEP SKPD se Provinsi Banten	Forum PEP SKPD se Provinsi Banten	1 Dokumen	1 Dokumen
		17. Penyusunan Dokumen evaluasi dan Inventarisasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Aparat Pemeriksa instansi Pemerintah (APIP) TA. 2014	Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Inventarisasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh aparat Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP) Tahun Anggaran 2014	1 Dokumen	1 Dokumen
		18. Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP) TA sebelumnya dan TA 2014	Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP) Tahun Anggaran sebelum dan Tahun Anggaran 2014	1 Dokumen	1 Dokumen
		19. Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Daerah (SIMRENDAs)	Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Rencana Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target	
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6
		20. Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Daerah (SIMPELDA)	Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen
		21.	Penyusunan Pedoman Umum Pemberian Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota Sumber dana APBD Provinsi Banten TA. 2014		1 Dokumen
	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur				
	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan Aparatur Bappeda Provinsi Banten	1. Pengembangan Wawasan Aparatur Bappeda Provinsi Banten	Pengembangan Wawasan Aparatur Bappeda Provinsi Banten	100 Orang	100 Orang
		2. Peningkatan Kompetensi Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Aparatur Bappeda Provinsi Banten	Peningkatan Kompetensi Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Aparatur Bappeda Provinsi Banten	40 orang	40 orang
		3. Peningkatan Kompetensi Pengembangan Sistem Informasi Bappeda Provinsi Banten	Peningkatan Kompetensi Pengembangan Sistem Informasi Bappeda Provinsi Banten	30 orang	30 orang

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target	
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6
		4. Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan Golongan PNS BAPPEDA Provinsi Banten	Fasiliatasi Kenaikan Pangkat dan Golongan PNS Bappeda Provinsi Banten	1 Dokumen	1 Dokumen
		5. Fasilitasi Kenaikan Gaji Berkala PNS BAPPEDA Provinsi Banten	Fasiliatasi Kenaikan Gaji Berkala PNS Bappeda Provinsi Banten	1 Dokumen	1 Dokumen
		6. Fasilitasi Perkuatan dan Validasi Data Pegawai BAPPEDA Provinsi Banten	Fasilitasi Perkuatan Kelembagaan dan Validasi Data Kepegawaian Bappeda Provinsi Banten	1 Dokumen	1 Dokumen
		7. Pemutakhiran Data Kepegawaian BAPPEDA Provinsi Banten	Pemutahiran Data Kepegawaian Bappeda Provinsi Banten	1 Dokumen	1 Dokumen
		8. Pekan Ilmiah Internal BAPPEDA Provinsi Banten	Pekan Ilmiah Internal Bappeda Provinsi Banten	1 Dokumen	1 Dokumen
		9. Fasilitasi Pengiriman Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS	Fasilitasi Pengiriman Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	5 Orang	5 Orang
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1. Pemeliharaan Gedung dan Halaman	Pemeliharaan Gedung dan Halaman	12 Bulan	12 Bulan
		2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	12 Bulan, 21 Unit Kendaraan Operasional Roda Empat dan 22 unit kendaraan Operasional Roda Dua	12 Bulan, 21 Unit Kendaraan Operasional Roda Empat dan 22 unit kendaraan Operasional Roda Dua

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target	
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6
		3. Pemeliharaan Barang Inventarisasi Kantor	Pemeliharaan Inventaris Kantor	12 Bulan, Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan, Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	1. Penunjang Penguatan Kelembagaan	Penunjang Penguatan Kelembagaan	2 Dokumen	2 Dokumen
		2. Penyediaan Barang Habis Pakai	Penyediaan Barang Habis Pakai	12 Bulan	12 Bulan
		3. Penyediaan Barang Cetak	Penyediaan Bahan Cetak	12 Bulan	12 Bulan
		4. Penyediaan Makanan dan Minum Kantor	Pengadaan Makanan dan Minum Kantor	12 Bulan	12 Bulan
		5. Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internet dan PHBI/PHBN	Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internet dan PHBI//PHBN	12 Bulan	12 Bulan
		6. Konsultasi dan Koordinasi Dalam dan Luar Wilayah Provinsi Banten	Konsultasi dan Koordinasi Dalam dan Luar Wilayah Provinsi	12 Bulan	12 Bulan
		7. Fasilitasi Penunjang Kegiatan Kantor	Fasilitas Penunjang Kegiatan dan Kantor	12 Bulan	12 Bulan
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	1. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat angkut darat bermotor micro bus berpenumpang 15-30 orang)	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	7 unit	7 Unit
		2. Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik	Pengadaan AC	10 Unit	10 Unit
		3. Belanja Modal Pengadaan Penghancur Kertas	Pengadaan Infocus + screnfiw	7 Unit	7 Unit
		4. Belanja Modal Pengadaan mesin absensi	Pengadaan Mesin Tik Elektrikal	4 Unit	4 Unit

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target	
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6
		5. Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	Pengadaan Mesin Finger Print (Absen)	1 Unit	1 Unit
		6. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Halaman Kantor	Pengadaan TV	2 paket	6 Unit
		7. Belanja modal pengadaan Komputer/PC	Pengadaan Marka Jalan Halaman Kantor Bappeda	10 unit	1 Paket
		8. Belanja modal pengadaan Komputer Note Book/Net Book/Laptop/ Tablet	Pengadaan Pembangunan/ Penambahan Pos Keamanan	20 unit	1 Paket
		9. Belanja modal pengadaan Printer	Pengadaan Pembuatan Pintu Gerbang Timur Kantor Bappeda	10 unit	1 Paket
		10. Belanja Modal Pengadaan Sofa	Pengadaan Komputer PC	1 set	10 Unit
		11. Belanja Modal Pengadaan AC	Pengadaan Note Book	10 unit	10 Unit
		12. Belanja Modal Pengadaan TV	Pengadaan PC Tablet	6 unit	10 Unit
		13. Belanja Modal Penghias Ruangan	Pengadaan Printer	1 paket	10 Unit
		14. Belanja Modal Pengadaan Proyektor	Pengadaan Sofa Lobby	7 unit	1 Set
		15. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian gedung kantor	Pengadaan Interior Muka Ruang Rapat Paripurna	1 paket	1 Paket
			Pembangunan Pintu Gerbang sebelah Selatan Kantor Bappeda		4 Unit
			Pengadaan Server dan Instalasinya		4 Unit
			Pengadaan Printer		1 Paket
			Belanja Modal Pengadaan		1 Paket

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target	
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6
			Kursi/Meja Kantin		
			Pengadaan AC Split 2 pk		10 Unit
			Belanja Modal Pengadaan Interior Ruang Sekretaris Bappeda Provinsi Banten		1 Paket
			Belanja Modal Pengadaan Interior Ruang Perpustakaan		10 Unit
			Belanja Modal Pengadaan Antena Penangkal Petir		1 Paket
			Belanja Modal Pengadaan Alat Alat Angkutan Darat Bermotor Roda Dua		1 Paket
			Belanja Modal Mesin Hitung		1 Paket
			Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC		2 Unit
			Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook		2 Unit
			Belanja Modal Pengadaan Interior Ruang Kepala Bidang Pengendalian Program		10 Unit
			Belanja Modal Pengadaan Interior Ruang Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah		8 Unit

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target	
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6
			Belanja Modal Pengadaan Interior Ruang Kepala Bidang Sosial Masyarakat		1 Paket
			Belanja Modal Pengadaan Interior Ruang Kepala Bidang Perekonomian		1 Paket
	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	1. Bimbingan Aplikasi Kearsipan Dinamis Bappeda	Bimbingan Aplikasi Kearsipan Dinamis Bappeda	1 Keg 25 Orang	
		2. Pengembangan Perpustakaan Khusus Bappeda	Pengembangan Perpustakaan Khusus Bappeda	1 Keg 15 Orang	
		3. Membangun Software Aplikasi Arsip dan Perpustakaan Khusus Bappeda	Membangun Software Aplikasi Arsip dan Perpustakaan Khusus Bappeda	1 dok	
	Statistik;				
	Penyediaan Data Pembangunan Daerah				
	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	1. Penyusunan Data Pembangunan Daerah	Penyusunan Data Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen
		2. Forum Data Pembanguna Daerah (Provinsi dan Kab./Kota)	Forum Data Pembanguna Daerah (Provinsi dan Kab./Kota)	1 Dokumen	1 Dokumen
		3. Penyusunan Data Pembangunan SKPD dan Kab./Kota	Penyusunan Data Pembangunan SKPD dan Kab./Kota	1 Dokumen	1 Dokumen
		4. Pengukuran Ketahanan Nasional di Daerah	Pengukuran Ketahanan Nasional di Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target	
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6
		5. Penyusunan Data Output Kegiatan SKPD Sesuai RPJMD	Penyusunan Data Output Kegiatan SKPD sesuai RPJMD	1 Dokumen	1 Dokumen
		6. Penyusunan Roodmap Pengelolaan Data Pembangunan di Daerah 2014-2017	Penyusunan Roodmap Pengelolaan Data Pembangunan di Daerah 2014-2017	1 Dokumen	1 Dokumen
		7. Penyusunan Juknis Bantuan Keuangan Update Data Pelaporan Kab./Kota Tahun 2015	Penyusunan Juknis Bantuan Keuangan Update Data Pelaporan Kab./Kota Tahun 2015	1 Dokumen	1 Dokumen
		8. Koordinasi Kelayakan Hibah BPS Provinsi Banten Tahun 2015	Koordinasi Kelayakan Hibah BPS Provinsi Banten Tahun 2015	1 Dokumen	1 Dokumen
		9. Penyusunan Profile Informasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Profile Informasi Pembangunan Daerah	1 Video Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Banten, Publikasi Data Pembangunan Daerah (Booklet, Leaflet, Banner)	1 Video Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Banten, Publikasi Data Pembangunan Daerah (Booklet, Leaflet, Banner)
		10. Penyusunan Sistem Pengelolaan Data Pembangunan Daerah	Penyusunan Sistem Pengelolaan Data Pembangunan Daerah	1 Paket	1 Paket

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2014

Perjanjian Kinerja Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014, dijelaskan pada tabel berikut ini :

**PENETAPAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

SKPD : BAPPEDA PROVINSI BANTEN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kegiatan dan Tolok Ukur	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan	Cakupan ketersediaan regulasi dan dokumen rencana tata ruang wilayah	3 dok	1. Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1.049.025.000,00
			1 Dokumen	- Evaluasi Capaian Kinerja SKPD Mitra Subid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tahun 2013	
			2 Dokumen	- Verifikasi Renja SKPD Mitra Subid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tahun 2015	
			1 Dokumen	- Verifikasi Renja Perubahan SKPD Mitra Subid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tahun 2014	
			2 Dokumen	- Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Nasional	
			1 Dokumen	- Koordinasi dan Konsultasi Penataan Ruang	
			2 Dokumen	- Penyelenggaraan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Banten	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kegiatan dan Tolok Ukur	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			1 Dokumen	- Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030	
			1 Dokumen	- Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Provinsi Banten	
			2 Dokumen	- Pengembangan Kawasan Metropolitan Provinsi Banten	
			1 Dokumen	- Koordinasi Perencanaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	
			1 Dokumen	- Koordinasi Pengelolaan DAS Provinsi Banten	
			1 Dokumen	- Pengendalian dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten (Monitoring dan Evaluasi Penataan Ruang)	
2.	Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan	100%	2. Perencanaan Pembangunan Daerah	2.471.000.000,00
			4 Dokumen	- Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2015	
			1 Dokumen	- Forum Konsultasi Publik RKPD Provinsi Banten Tahun 2015	
			1 Dokumen	- Verifikasi Rancangan Renja SKPD Provinsi Banten Tahun	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kegiatan dan Tolok Ukur	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				2015	
			1 Dokumen	- Verifikasi Rancangan Akhir Renja SKPD Provinsi Banten Tahun 2015	
			1 Dokumen	- Pra Musrenbang RKPD Provinsi Banten Tahun 2015	
			1 Dokumen	- Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Provinsi Banten Tahun 2014	
			3 Dokumen	- Penyusunan Dokumen Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2014	
			1 Dokumen	- Verifikasi Perubahan Renja SKPD Provinsi Banten Tahun 2014	
			3 Dokumen	- Konsultasi Dan Rekomendasi Raperda RPJMD Kabupaten / Kota	
	-			3. Perencanaan Anggaran Pembangunan Daerah	1.200.000.000,00
			1 Dokumen	- Tata Cara Penyusunan DRPK SKPD TA. 2015	
			1 Dokumen	- Verifikasi DRPK TA. 2015	
			1 Dokumen	- Sosialisasi Penyusunan Usulan Kegiatan Dan Pendanaan Pembangunan Daerah (UKPPD) Tahun 2015	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kegiatan dan Tolok Ukur	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			1 Dokumen	- Fasilitasi Musrenbangnas	
			2 Dokumen	- Penyusunan KUA Dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2015	
			2 Dokumen	- Penyusunan KUA Dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran. 2014	
			1 Dokumen	- Fasilitasi Koordinasi Dan Konsultasi Perencanaan Penganggaran Pembangunan	
				4. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Indagkop, Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata	800.000.000,00
			1 Dokumen (3 buku) 1 Kali Kegiatan	- Evaluasi Renja Mitra 2013	
			1 Dokumen (3 buku) 1 Kali Kegiatan	- Verifikasi Mitra 2015	
			1 Dokumen (8 buku) 1 Kali Kegiatan	- Verifikasi Renja Perubahan Mitra 2014	
			1 Dokumen (8 buku) 1 Kali Kegiatan	- Koordinasi Perencanaan Lintas Sektor Dan Wilayah SKPD Mitra Indagkop,Investasi,Kebudayaan Dan Pariwisata	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kegiatan dan Tolok Ukur	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			1 Dokumen (3 buku) 1 Kali Kegiatan	- Koordinasi Pengendalian Perencanaan Renja Mitra Subid 2015	
			1 Dokumen 1 Kali Kegiatan	- Penyusunan Strategi Peningkatan Daya Saing Investasi Wilayah Serang Dan Cilegon	
			1 Dokumen (9 buku) 1 Kali Kegiatan	- Evaluasi Perkembangan Perekonomian Banten	
			1 Dokumen (8 buku) 1 Kali Kegiatan	- Koordinasi Pelaksanaan PT Jamkrida	
			1 Dokumen (1 Paket) 1 Kali Kegiatan	- Koordinasi Sektor Perindustrian dan Perdagangan Dalam Menghadapi Pasar Bebas ASEAN (AFTA) 2015	
			1 Dokumen (8 buku) 1 Kali Kegiatan	- Koordinasi Sektor IKM dan UMKM Se Provinsi Banten	
				5. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Agribisnis dan Bisnis Kelautan	800.000.000,00
			1 dokumen	- Evaluasi Kinerja OPD Mitra Subid Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2013	
			2 dokumen	- Verifikasi Rancangan Rencana Kerja OPD Mitra Subid Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2015	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kegiatan dan Tolok Ukur	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			1 dokumen	- Verifikasi Rancangan Rencana Kerja Perubahan OPD Mitra Subid Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2015	
			1 dokumen	- Fasilitasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2015	
			1 dokumen	- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian Tahun 2014	
			1 dokumen	- Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi	
			1 dokumen	- Koordinasi Pelaksanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	
			3 dokumen	- Koordinasi Pengembangan Kawasan Minapolitan	
			2 dokumen	- Koordinasi Kawasan Agropolitan dan Sentra Produksi	
			3 dokumen	- Fasilitasi Pengembangan Agribisnis	
			2 dokumen	- Pemantapan Kemandirian Pangan	
				6. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Wilayah	1.250.975.000,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kegiatan dan Tolok Ukur	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			1 Dokumen	- Evaluasi Capaian Kinerja SKPD Mitra Infrastruktur Wilayah Tahun 2013	
			1 Dokumen	- Verifikasi Renja SKPD Mitra Bidang Infrastruktur Wilayah Tahun 2015	
			1 Dokumen Prosiding	- Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Penataan Ruang Dan Prasarana Wilayah	
			1 Dokumen	- Verifikasi Renja Perubahan SKPD Mitra Bidang Infrastruktur Wilayah Tahun 2014	
			1 Dokumen	- Sinergitas Perencanaan Daerah Dan Nasional	
			1 Dokumen	- Koordinasi Perencanaan Program Bidang Perumahan Dan Permukiman	
			1 Dokumen	- Koordinasi Perencanaan Program Bidang Sumber Daya Air	
			1 Dokumen Prosiding	- Lokakarya Perencanaan Penanganan Sumber Daya Air Dan Permukiman	
			1 Dokumen	- Koordinasi Perencanaan Program Bidang Prasarana Transportasi	
			1 Dokumen Prosiding	- Lokakarya Perencanaan Penanganan Infrastruktur Wilayah	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kegiatan dan Tolok Ukur	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			1 Dokumen	- Koordinasi Perencanaan Dak Bidang Infrastruktur Wilayah	
			1 Dokumen	- Koordinasi Perencanaan Program AMPL/PPSP	
			1 Dokumen	- Penjaminan Kualitas Dokumen PPSP Kab/Kota Tahun 2014	
			1 Dokumen Prosiding	- Workshop Fasilitasi Penyusunan SSK Dan MPS Kab/Kota	
			1 Dokumen	- Penyusunan Data Dan Informasi Bidang Infrastruktur Wilayah	
			1 Dokumen	- Analisa Pencapaian Target Kinerja Pembangunan Bidang Infrastruktur Wilayah	
			1 Dokumen	- Analisa Perkembangan Infrastruktur Jalan Mendukung Kawasan Strategis Prioritas	
			1 Dokumen Kajian	- Study Kebutuhan Infrastruktur Pada Kawasan Strategis Bayah Dan Cibaliung	
				7. Perencanaan dan Pengendalian Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban	750.000.000,00
			1 Dokumen	- Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Renja SKPD Lingkup Bidang Pemerintahan Tahun 2013	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kegiatan dan Tolok Ukur	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			2 Dokumen	- Verifikasi Rancangan Renja SKPD Lingkup Bidang Pemerintahan Tahun 2015	
			1 Dokumen	- Verifikasi Renja Perubahan SKPD Lingkup Bidang Pemerintahan	
			1 Dokumen	- Rapat Koordinasi SKPD Lingkup Bidang Pemerintahan	
			1 Dokumen	- Koordinasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah Lingkup Bidang Pemerintah	
			1 Dokumen	- Rakor Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
			4 Dokumen	- Penyusunan Laporan Aksi Daerah Mendukung Pencapaian Sasaran Program Inpres 1 Tahun 2012	
			1 Dokumen	- Rakor Penyusunan Program Kegiatan Hak Asazi Manusia (HAM)	
			4 Dokumen	- Penyusunan Laporan Rencana Aksi Daerah Mendukung Pencapaian Sasaran Program Inpres 3 Tahun 2010	
				8. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Gender	900.000.000,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kegiatan dan Tolok Ukur	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			1 Dok	- Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Renja SKPD Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2013	
			2 Dok	- Verifikasi Rancangan Renja SKPD Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2015	
			1 Dok	- Verifikasi Renja Perubahan SKPD Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2014	
			1 Dok	- Koordinasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional Daerah Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2015	
			1 Dok	- Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran PUHA	
			1 Dok	- Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran PUG	
			1 Dok	- Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran Penanggulangan HIV/AIDS Dan Narkoba	
			1 Dok	- Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Kab/Kota Sehat	
			1 Dok	- Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran Program Kelangsungan Hidup Perkembangan Perlindungan Ibu Dan Anak	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kegiatan dan Tolok Ukur	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				9. Perencanaan Pengendalian SDM, Budaya dan Keagamaan	800.000.000,00
			1 Dokumen	- Evaluasi Renja SKPD Mitra Tahun 2013	
			2 Dokumen	- Verifikasi Renja SKPD Mitra Tahun 2015	
			1 Dokumen	- Verifikasi Renja Perubahan SKPD Mitra Tahun 2014	
			1 Dokumen	- Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang SDM Tahun 2015	
			1 Dokumen	- Rakor Bidang Sosmas	
			1 Dokumen	- Fasilitasi Koordinasi Relevansi Pendidikan dan Ketenagakerjaan	
			1 Dokumen	- Pemetaan Pengembangan Daya Saing SDM	
			1 Dokumen	- Peningkatan Akses Pendidikan Kejuruan di Kawasan Strategis dan Perbatasan	
				10. Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	900.000.000,00
			11 Dokumen	- Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program-Program Penanggulangan Kemiskinan	
			1 Dokumen	- Rapat Koordinasi Penanggulangan kemiskinan	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kegiatan dan Tolok Ukur	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Provinsi Banten Tahun 2014	
			1 Dokumen	- Rapat Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat	
			1 Dokumen	- Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) dan JAMSOSRATU	
			16 Dokumen	- Penyusunan Rencana Kerja Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015	
			1 Dokumen	- Pelatihan Pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan	
			1 Dokumen	- Penyusunan Dokumen Program Pembangunan Perdesaan Terpadu (P3T) Tahun 2015	
			1 Dokumen	- Monitoring dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan	
				Penyusunan Peraturan Gubernur Banten tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017	
				11. Perencanaan dan Pengendalian Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) Provinsi Banten	400.000.000,00
			1 Dokumen	- Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Tim Kerja Komite	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kegiatan dan Tolok Ukur	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Provinsi Banten	
			1 Dokumen	- Penyusunan Kerangka Pengembangan Regulasi KP3EI Banten	
			1 Dokumen	- Penyusunan Kerangka Pengembangan Konektivitas KP3EI Banten	
			1 Dokumen	- Penyusunan Kerangka Pengembangan SDM dan IPTEK KP3EI Banten	
3.	Pengendalian Pembangunan Daerah	Cakupan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan	100%	12. Pengendalian dan Evaluasi Program APBD	1.737.000.000,00
			1 Dokumen (40 buku)	- Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Banten Tahun 2013	
			1 Dokumen (200 buku)	- Penyusunan LKPj Gubernur Banten Tahun 2012	
			1 Dokumen (50 buku)	- Evaluasi Kebijakan Rencana Pembangunan Kab/Kota Tahun 2013	
			1 Dokumen (80 buku)	- Penyusunan TAPKIN dan IKU Provinsi Banten Tahun 2014	
			4 Dokumen (80 buku)	- Penyusunan Pelaporan Program Triwulanan APBD Provinsi Banten Tahun 2014	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kegiatan dan Tolok Ukur	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			2 Dokumen (20 buku)	- Pemantauan Hasil Pelaksanaan APBD Provinsi Banten TA. 2014	
			1 Dokumen (50 buku)	- Verifikasi Pengendalian Capaian Kinerja Program APBD Provinsi Banten Tahun 2014	
			1 Dokumen (50 buku)	- Evaluasi RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012 - 2017	
				13. Pengendalian dan Evaluasi Program APBN dan Dana Lainnya	755,000,000.00
			8 Dokumen (120 Buku)	- Pengendalian Dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan APBN 2014	
			4 Dokumen (80 Buku)	- Pengendalian Dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan DAK 2014	
			2 Dokumen (40 Buku)	- Pengendalian Dan Evaluasi Hasil Pemantauan Kinerja Pelaksanaan Renc. Pemb. Daerah Sumber Dana APBN Dan Dana Lainnya Tahun 2014	
4.	Kerjasama Pembangunan Daerah	Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah	3 dok	14. Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan	1.000.000.000,00
			1 Dokumen	- Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Renja SKPD Lingkup Tata Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan Daerah Tahun 2013	
			3 Dokumen	- Verifikasi Rancangan Renja Tata Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan Tahun 2015	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kegiatan dan Tolok Ukur	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			1 Dokumen	- Rakor Kerjasama Pembangunan Lintas Wilayah dan Sektor Provinsi Banten Tahun 2014	
			3 Dokumen	- Evaluasi Musrenbang Regional Se Jawa-Bali	
			1 Dokumen	- Koordinasi Tata Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan	
			1 Dokumen	- Koordinasi Perencanaan Kerjasama Antar Kab/Kota	
			1 Dokumen	- Koordinasi Penyiapan Kerjasama Pemerintah Swasta	
			1 Dokumen	- Koordinasi Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS)	
			1 Dokumen	- Koordinasi Perencanaan Reformasi dan Birokrasi	
5.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	100%	15. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	500.000.000,00
			1 Dokumen	- Penyusunan Dokumen Evaluasi LRA, Neraca dan CaLK SKPD BAPPEDA Provinsi Banten TA. 2013	
			1 Dokumen	- Penyusunan Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Anggaran Internal Kegiatan SKPD Bappeda	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kegiatan dan Tolok Ukur	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Provinsi Banten TA 2014	
			1 Dokumen	- Penyusunan Verifikasi Kode Rekening anggaran dan Penyesuaian Tarif Harga Satuan sesuai Standar Satuan Harga (SSH) pada Kegiatan Bappeda Provinsi Banten TA. 2014	
			1 Dokumen	- Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi dan Pencocokan Data Akuntansi (SP2D) Penyerapan Anggaran Kegiatan pada SKPD Bappeda Provinsi Banten TA. 2014	
			1 Dokumen	- Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi dan Pencocokan Data Aset dan Inventarisasi Barang Persediaan pada SKPD BAPPEDA Provinsi Banten	
			1 Dokumen	- Penyusunan Dokumen SPP, SPM, SP2D dan SPJ Kegiatan Bappeda Provinsi Banten TA 2014	
			1 Dokumen	- Penyusunan Dokumen LRA, Neraca dan CaLK Laporan Akuntabilitas Kegiatan SKPD Bappeda Provinsi Banten TA. 2014	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kegiatan dan Tolok Ukur	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			1 Dokumen	- Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Inventarisasi Barang/Jasa Aset Kegiatan SKPD Bappeda Provinsi Banten TA 2014	
			1 Dokumen	- Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi Data Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Kegiatan Bappeda Provinsi Banten Sumber Dana APBN TA. 2014 Periode TW I; TW II; TW III; TW IV	
			1 Dokumen	- Penyusunan Dokumen Neraca, LRA dan CaLK Kegiatan Sumber Dana APBN Satker Bappeda Provinsi Banten TA. 2014 Semester I dan Semester II	
			1 Dokumen	- Penyusunan Dokumen Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Kegiatan BAPPEDA Provinsi Banten TA. 2014	
			1 Dokumen	- Penyusunan Dokumen Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kegiatan BAPPEDA Provinsi Banten TA. 2014	
				16. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1.450.000.000,00
			1 Dokumen	- Penyusunan LAKIP Bappeda Provinsi Banten Tahun 2013	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kegiatan dan Tolok Ukur	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			1 Dokumen	- Penyusunan LKPJ Bappeda Provinsi Banten Tahun 2013	
			1 Dokumen	- Penyusunan LPPD Bappeda Provinsi Banten Tahun 2013	
			1 Dokumen	- Penyusunan Evaluasi Semesteran Kegiatan Bappeda Provinsi Banten Tahun 2014	
			1 Dokumen	- Penyusunan Evaluasi Kegiatan Bappeda Akhir Tahun 2014	
			1 Dokumen	- Penyusunan TAPKIN dan IKU Bappeda Provinsi Banten Tahun 2014	
			1 Dokumen	- Penyusunan RENJA Bappeda Provinsi Banten Tahun 2015	
			1 Dokumen	- Penyusunan Rencana Operasional Kegiatan Tahun 2015	
			1 Dokumen	- Penyusunan DRPK Tahun 2015	
			1 Dokumen	- Penyusunan Kerangka Logis dan Perubahan Penganggaran Bappeda Provinsi Banten Tahun 2014	
			1 Dokumen	- Penyusunan Kerangka Logis dan Penganggaran Bappeda Provinsi Banten Tahun 2015	
			1 Dokumen	- Penyusunan Usulan Standar Satuan Harga Bappeda Provinsi Banten	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kegiatan dan Tolok Ukur	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			12 Dokumen	- Penyusunan Laporan Bulanan Kegiatan Bappeda Provinsi Banten Tahun 2014	
			12 Dokumen	- Penyusunan Laporan Barang/Jasa Kegiatan Bappeda Provinsi Banten	
			1 Dokumen	- Forum Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Banten	
			1 Dokumen	- Forum PEP SKPD se Provinsi Banten	
			1 Dokumen	- Penyusunan Dokumen evaluasi dan Inventarisasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Aparat Pemeriksa instansi Pemerintah (APIP) TA. 2014	
			1 Dokumen	- Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP) TA sebelumnya dan TA 2014	
			1 Dokumen	- Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Daerah (SIMRENDA)	
			1 Dokumen	- Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Daerah (SIMPELDA)	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kegiatan dan Tolok Ukur	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur	Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan	100%	18 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	2.385.280.000,00
			7 unit	- Belanja Modal Pengadaan Alat-alat angkut darat bermotor micro bus berpenumpang 15-30 orang)	
			10 Unit	- Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik	
			7 Unit	- Belanja Modal Pengadaan Penghancur Kertas	
			4 Unit	- Belanja Modal Pengadaan mesin absensi	
			1 Unit	- Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	
			2 paket	- Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Halaman Kantor	
			10 unit	- Belanja modal pengadaan Komputer/PC	
			20 unit	- Belanja modal pengadaan Komputer Note Book/Net Book/Laptop/Tablet	
			10 unit	- Belanja modal pengadaan Printer	
			1 set	- Belanja Modal Pengadan Sofa	
			10 unit	- Belanja Modal Pengadan AC	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kegiatan dan Tolok Ukur	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			6 unit	- Belanja Modal Pengadaan TV	
			1 paket	- Belanja Modal Penghias Ruang	
			7 unit	- Belanja Modal Pengadaan Proyektor	
			1 paket	Belanja Modal Pengadaan - Konstruksi/pembelian gedung kantor	
				19 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	4.037.536.500,00
			2 Dokumen	- Penunjang Penguatan Kelembagaan	
			12 Bulan	- Penyediaan Barang Habis Pakai	
			12 Bulan	- Penyediaan Barang Cetak	
			12 Bulan	- Penyediaan Makan dan Minum Kantor	
			12 Bulan	- Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internet dan PHBI/PHBN	
			12 Bulan	- Konsultasi dan Koordinasi Dalam dan Luar Wilayah Provinsi Banten	
			12 Bulan	- Fasilitasi Penunjang Kegiatan Kantor	
		Tercapainya Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana		20 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.985.683.500,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kegiatan dan Tolok Ukur	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		dan Sarana Aparatur			
			12 Bulan	- Pemeliharaan Gedung dan Halaman	
			12 Bulan, 21 Unit Kendaraan Operasional Roda Empat dan 22 unit kendaraan Operasional Roda Dua	- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	
			12 Bulan, Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor	- Pemeliharaan Barang Inventarisasi Kantor	
		Tercapainya Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian		21 Peningkatan Kapasitas Aparatur	654.500.000,00
			100 Orang	- Pengembangan Wawasan Aparatur Bappeda Provinsi Banten	
			40 orang	- Peningkatan Kompetensi Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Aparatur Bappeda Provinsi Banten	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kegiatan dan Tolok Ukur	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			30 orang	- Peningkatan Kompetensi Pengembangan Sistem Informasi Bappeda Provinsi Banten	
			1 Dokumen	- Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan Golongan PNS BAPPEDA Provinsi Banten	
			1 Dokumen	- Fasilitasi Kenaikan Gaji Berkala PNS BAPPEDA Provinsi Banten	
			1 Dokumen	- Fasilitasi Perkuatan dan Validasi Data Pegawai BAPPEDA Provinsi Banten	
			1 Dokumen	- Pemutakhiran Data Kepegawaian BAPPEDA Provinsi Banten	
			1 Dokumen	- Pekan Ilmiah Internal BAPPEDA Provinsi Banten	
			5 Orang	- Fasilitasi Pengiriman Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS	
		Tercapainya Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian		22 Peningkatan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	374.000.000,00
			100 Orang	- Bimbingan Aplikasi Kearsipan Dinamis Bappeda	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kegiatan dan Tolok Ukur	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				- Pengembangan Perpustakaan Khusus Bappeda	
				- Membangun Software Aplikasi Arsip dan Perpustakaan Khusus Bappeda	
7.	Penyediaan Data Pembangunan Daerah	Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan	41 Paket	22 Peningkatan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	374.000.000,00
			1 Dokumen	- Penyusunan Data Pembangunan Daerah	
			1 Dokumen	- Forum Data Pembanguna Daerah (Provinsi dan Kab./Kota)	
			1 Dokumen	- Penyusunan Data Pembangunan SKPD dan Kab./Kota	
			1 Dokumen	- Pengukuran Ketahanan Nasional di Daerah	
			1 Dokumen	- Penyusunan Data Output Kegiatan SKPD Sesuai RPJMD	
			1 Dokumen	- Penyusunan Roodmap Pengelolaan Data Pembangunan di Daerah 2014-2017	
			1 Dokumen	- Penyusunan Juknis Bantuan Keuangan Update Data Pelaporan Kab./Kota Tahun 2015	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kegiatan dan Tolok Ukur	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			1 Dokumen	- Koordinasi Kelayakan Hibah BPS Provinsi Banten Tahun 2015	
			1 Video Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Banten, Publikasi Data Pembangunan Daerah (Booklet, Leaflet, Banner)	- Penyusunan Profile Informasi Pembangunan Daerah	
			1 Paket	- Penyusunan Sistem Pengelolaan Data Pembangunan Daerah	
Jumlah anggaran Tahun 2014					27.000.000.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEDA PROVINSI BANTEN 2014

Sesuai amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan dan Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu juga menunjukkan upaya pertanggungjawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan demikian sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan Organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut . Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja Instansi Pemerintah.

Hal itu sejalan pula dengan Agenda Penguatan Pengawasan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan dilakukannya review atas pencapaian Kinerja Utama Instansi Pemerintah yang bertitik berat pada penilaian efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Secara umum Bappeda Provinsi Banten telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Banten, telah ditetapkan 1 (satu) sasaran “meningkatnya Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan”.

3.1. EVALUASI KINERJA

Evaluasi pencapaian kinerja yang dimaksud dalam laporan ini adalah evaluasi internal yaitu penilaian secara mandiri oleh Bappeda Provinsi Banten terhadap hasil pengukuran kinerja kegiatan dan kinerja sasaran.

Dalam evaluasi ini juga diuraikan hal – hal yang mendukung keberhasilan sekaligus hal – hal yang menghambat sehingga menimbulkan kegagalan pencapaian target. Diupayakan pula menginventarisir langkah – langkah antisipasi yang akan dilakukan sehingga kinerja pemerintah semakin baik pada masa – masa yang akan datang.

Secara umum Bappeda Provinsi Banten telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di RPJMD Provinsi Banten telah ditetapkan 1 (satu) sasaran, 7 (tujuh) Sasaran Strategis (program) dan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Program (Outcome).

Dari 1 (satu) sasaran dengan 7 (tujuh) Sasaran strategis (program) pencapaian indikator kinerja pemerintah Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Persentase pencapaian indikator kinerja (outcome)

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target RPJMD (akhir periode)	Target Kinerja Tahun Berjalan yang di evaluasi	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan	Cakupan Ketersediaan regulasi dan dokumen rencana tata ruang wilayah	15 dok	3 dok	3 dok	100%
2	Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan	100%	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target RPJMD (akhir periode)	Target Kinerja Tahun Berjalan yang di evaluasi	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
3	Pengendalian Pembangunan Daerah	Cakupan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan	100%	100%	100%	100%
4	Kerjasama Pembangunan Daerah	Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah	15 dok	3 dok	3 dok	100%
5	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan	100%	100%	100%	100%
		Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	100%	100%	100%	100%
6	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur	Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan	100%	100%	100%	100%
		Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke Luar Daerah	100%	100%	100%	100%
		Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur	100%	100%	100%	100%
		Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepeg	100%	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target RPJMD (akhir periode)	Target Kinerja Tahun Berjalan yang di evaluasi	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
7	Penyediaan Data Pembangunan Daerah	Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan	10 dok	2 dok	2 dok	100%

1. Sasaran strategis (program) Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan dengan pagu sebesar Rp. 1.199.025.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 1.144.637.200,00 (95,46%) sedangkan realisasi fisik yang dicapai 100% dari target 3 Dokumen yang telah ditetapkan, hal ini ditunjang oleh 1 (satu) kegiatan sehingga capaian dimaksud dapat terealisasi seluruhnya.

Tabel 3.2
Analisis Pencapaian Sasaran Pertama

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Tahun 2013		Capaian Kinerja Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja Tahun 2014
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cakupan Ketersediaan regulasi dan dokumen rencana tata ruang wilayah	Dokumen	3	3	100%	3	3	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran pada tabel tersebut diatas terlihat bahwa indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%, Perbandingan capaian kinerja tahun 2013 dengan capaian kinerja 2014 sesuai dengan target yang ditetapkan.

Rencana dan realisasi target kinerja tolok ukur kinerja output dari kegiatan dalam mendukung capaian indikator sasaran pada tahun 2014 dalam mencapai indikator sasaran, sebagai berikut:

TABEL 3.3
RENCANA DAN REALISASI CAPAIAN INDIKATOR
KINERJA OUTPUT KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2014

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target		Realisasi	%
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan						
1	Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1. Evaluasi Capaian Kinerja SKPD Mitra Subsid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tahun 2013	Evaluasi Capaian Kinerja SKPD Mitra Subsid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tahun 2013	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		2. Verifikasi Renja SKPD Mitra Subsid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tahun 2015	Verifikasi Renja SKPD Mitra Subsid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tahun 2015	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		3. Verifikasi Renja Perubahan SKPD Mitra Subsid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tahun 2014	Verifikasi Renja Perubahan SKPD Mitra Subsid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tahun 2014	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		4. Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Nasional	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Nasional	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		5. Koordinasi dan Konsultasi Penataan Ruang	Koordinasi dan Konsultasi Penataan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		6. Penyelenggaraan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Banten	Penyelenggaraan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Banten	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		7. Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030	Evaluasi Rencana Penataan Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		8. Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Provinsi Banten	Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Provinsi Banten	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		9. Pengembangan Kawasan Metropolitan Provinsi Banten	Pengembangan Kawasan Metropolitan Serang-Cilegon (Seragon) Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target		Realisasi	%
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8
			Banten				
		10. Koordinasi Perencanaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Koordinasi Perencanaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		11. Koordinasi Pengelolaan DAS Provinsi Banten	Koordinasi Pengelolaan DAS Provinsi Banten	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		12. Pengendalian dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten (Monitoring dan Evaluasi Penataan Ruang)	Pengendalian dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten (Monitoring dan Evaluasi Penataan Ruang)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
			Pengembangan Wilayah Perkotaan di Provinsi Banten		1 Dokumen	1 Dokumen	100

2. Sasaran strategis (program) Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan dengan pagu sebesar Rp. 11.671.975.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 11.139.794.458,00 (95,44%) sedangkan realisasi fisik yang dicapai 100% dari target 100% Dokumen yang telah ditetapkan, hal ini ditunjang oleh 10 (sepuluh) kegiatan sehingga capaian dimaksud dapat terealisasi seluruhnya.

Tabel 3.4
Analisis Pencapaian Sasaran Kedua

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Tahun 2013		Capaian Kinerja Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja Tahun 2014
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan	Prosen	100	100	100%	100	100	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran pada tabel tersebut diatas terlihat bahwa indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%, Perbandingan capaian kinerja tahun 2013 dengan capaian kinerja 2014 sesuai dengan target yang ditetapkan.

Rencana dan realisasi target kinerja tolok ukur kinerja output dari kegiatan dalam mendukung capaian indikator sasaran pada tahun 2014 dalam mencapai indikator sasaran, sebagai berikut:

TABEL 3.5
RENCANA DAN REALISASI CAPAIAN INDIKATOR
KINERJA OUTPUT KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2014

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target		Realisasi	%
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Perencanaan pembangunan;						
	Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah						
	Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2015	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2015	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100
		2. Forum Konsultasi Publik RKPD Provinsi Banten Tahun 2015	Forum Konsultasi Publik RKPD Provinsi Banten Tahun 2015	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		3. Verifikasi Rancangan Renja SKPD Provinsi Banten Tahun 2015	Verifikasi Rancangan Renja SKPD Provinsi Banten Tahun 2015	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		4. Verifikasi Rancangan Akhir Renja SKPD Provinsi Banten Tahun 2015	Verifikasi Rancangan Akhir Renja SKPD Provinsi Banten Tahun 2015	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		5. Pra Musrenbang RKPD Provinsi Banten Tahun 2015	Pra Musrenbang RKPD Provinsi Banten Tahun 2015	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		6. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Provinsi Banten Tahun 2014	Musrenbang RKPD Provinsi Banten Tahun 2015	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		7. Penyusunan Dokumen Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2014	Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2014	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target		Realisasi	%
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8
		8. Verifikasi Perubahan Renja SKPD Provinsi Banten Tahun 2014	Verifikasi Perubahan Renja SKPD Provinsi Banten Tahun 2014	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		9. Konsultasi Dan Rekomendasi Raperda RPJMD Kabupaten / Kota	Konsultasi dan Rekomendasi Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100
			Penyusunan Rapergub Tentang Juknis Pelaksanaan Forum Skpd Provisi Banten		1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Perencanaan Anggaran Pembangunan Daerah	1. Tata Cara Penyusunan DRPK SKPD TA. 2015	Tata Cara Penyusunan DRPK SKPD Tahun Anggaran 2015	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		2. Verifikasi DRPK TA. 2015	Verifikasi DRPK SKPD TA. 2015	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		3. Sosialisasi Penyusunan Usulan Kegiatan Dan Pendanaan Pembangunan Daerah (UKPPD) Tahun 2015	Sosialisasi Penyusunan Usulan Kegiatan dan Pendanaan Pembangunan Daerah (UKPPD) Tahun 2015	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		4. Fasilitasi Musrenbangnas	Fasilitasi Musrenbangnas	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		5. Penyusunan KUA Dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2015	Penyusunan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2015	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		6. Penyusunan KUA Dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran. 2014	Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD TA. 2014	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		7. Fasilitasi Koordinasi Dan Konsultasi Perencanaan Penganggaran Pembangunan	Fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan Penganggaran Pembangunan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
			Verifikasi DRPK Bantuan Keuangan Ke Kabupaten/Kota TA. 2015		1 Dokumen	1 Dokumen	100
			Penyusunan Rancangan PERGUB Pedoman Perencanaan Bantuan Keuangan Ke Kabupaten/Kota Tahun 2015		2 Dokumen	2 Dokumen	100
	Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Indagkop, Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata	1. Evaluasi Renja Mitra 2013	Evaluasi Renja Mitra 2013	1 Dokumen (3 buku) 1 Kali Kegiatan	1 Dokumen (3 buku) 1 Kali Kegiatan	1 Dokumen (3 buku) 1 Kali Kegiatan	100
		2. Verifikasi Mitra 2015	Verifikasi Renja Mitra 2015	1 Dokumen (3 buku) 1 Kali Kegiatan	1 Dokumen (3 buku) 1 Kali Kegiatan	1 Dokumen (3 buku) 1 Kali Kegiatan	100
		3. Verifikasi Renja Perubahan Mitra 2014	Verifikasi Renja Perubahan Mitra 2014	1 Dokumen (8 buku) 1 Kali Kegiatan	1 Dokumen (8 buku) 1 Kali Kegiatan	1 Dokumen (8 buku) 1 Kali Kegiatan	100

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target		Realisasi	%
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Koordinasi Perencanaan Lintas Sektor Dan Wilayah SKPD Mitra Indagkop, Investasi, Kebudayaan Dan Pariwisata	Koordinasi Perencanaan Lintas Sektor dan Wilayah Mitra	1 Dokumen (8 buku) 1 Kali Kegiatan	1 Dokumen (8 buku) 1 Kali Kegiatan	1 Dokumen (8 buku) 1 Kali Kegiatan	100
		5. Koordinasi Pengendalian Perencanaan Renja Mitra Subid 2015	Koordinasi Pengendalian Perencanaan Renja Mitra Subid 2015	1 Dokumen (3 buku) 1 Kali Kegiatan	1 Dokumen (3 buku) 1 Kali Kegiatan	1 Dokumen (3 buku) 1 Kali Kegiatan	100
		6. Penyusunan Strategi Peningkatan Daya Saing Investasi Wilayah Serang Dan Cilegon	Penyusunan Strategi Peningkatan Daya Saing Investasi Wilayah Serang dan Cilegon	1 Dokumen 1 Kali Kegiatan	1 Dokumen 1 Kali Kegiatan	1 Dokumen 1 Kali Kegiatan	100
		7. Evaluasi Perkembangan Perekonomian Banten	Evaluasi Perkembangan Perekonomian Banten	1 Dokumen (9 buku) 1 Kali Kegiatan	1 Dokumen (9 buku) 1 Kali Kegiatan	1 Dokumen (9 buku) 1 Kali Kegiatan	100
		8. Koordinasi Pelaksanaan PT Jamkrida	Koordinasi Pelaksanaan PT Jamkrida	1 Dokumen (8 buku) 1 Kali Kegiatan	1 Dokumen (8 buku) 1 Kali Kegiatan	1 Dokumen (8 buku) 1 Kali Kegiatan	100
		9. Koordinasi Sektor Perindustrian dan Perdagangan Dalam Menghadapi Pasar Bebas ASEAN (AFTA) 2015	Koordinasi Perdagangan Dalam Menghadapi Pasar Bebas ASEAN (AFTA) 2015	1 Dokumen (1 Paket) 1 Kali Kegiatan	1 Dokumen (1 Paket) 1 Kali Kegiatan	1 Dokumen (1 Paket) 1 Kali Kegiatan	100
		10. Koordinasi Sektor IKM dan UMKM Se Provinsi Banten	Koordinasi Sektor IKM dan UMKM se Provinsi Banten	1 Dokumen (8 buku) 1 Kali Kegiatan	1 Dokumen (8 buku) 1 Kali Kegiatan	1 Dokumen (8 buku) 1 Kali Kegiatan	100
	Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Agribisnis dan Bisnis Kelautan	1. Evaluasi Kinerja OPD Mitra Subid Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2013	Evaluasi Kinerja OPD Mitra Subid Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2013	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100
		2. Verifikasi Rancangan Rencana Kerja OPD Mitra Subid Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2015	Verifikasi Rancangan Rencana Kerja OPD Mitra Subid Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2015	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100
		3. Verifikasi Rancangan Rencana Kerja Perubahan OPD Mitra Subid Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2015	Verifikasi Rancangan Rencana Kerja Perubahan OPD Mitra Subid Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2015	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100
		4. Fasilitasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2015	Fasilitasi Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional Bidang Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2015	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100
		5. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian Tahun 2014	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian Tahun 2014	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target		Realisasi	%
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8
		6. Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi	Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100
		7. Koordinasi Pelaksanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Koordinasi Pelaksanaan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100
		8. Koordinasi Pengembangan Kawasan Minapolitan	Koordinasi Pengembangan Kawasan Minapolitan	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100
		9. Koordinasi Kawasan Agropolitan dan Sentra Produksi	Koordinasi Kawasan Agropolitan dan Sentra Produksi	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100
		10. Fasilitasi Pengembangan Agribisnis	Fasilitasi Pengembangan Agribisnis	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100
		11. Pemantapan Kemandirian Pangan	Pemantapan Kemandirian Pangan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100
	Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Wilayah	1. Evaluasi Capaian Kinerja SKPD Mitra Infrastruktur Wilayah Tahun 2013	Evaluasi Capaian Kinerja SKPD Mitra Infrastruktur Wilayah Tahun 2013	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		2. Verifikasi Renja SKPD Mitra Bidang Infrastruktur Wilayah Tahun 2015	Verifikasi Renja SKPD Mitra Bidang Infrastruktur Wilayah Tahun 2015	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		3. Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Penataan Ruang Dan Prasarana Wilayah	Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Penataan Ruang Dan Prasarana Wilayah	1 Dokumen Prosiding	1 Dokumen Prosiding	1 Dokumen Prosiding	100
		4. Verifikasi Renja Perubahan SKPD Mitra Bidang Infrastruktur Wilayah Tahun 2014	Verifikasi Renja Perubahan SKPD Mitra Bidang Infrastruktur Wilayah Tahun 2014	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		5. Sinergitas Perencanaan Daerah Dan Nasional	Sinergitas Perencanaan Daerah Dan Nasional	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		6. Koordinasi Perencanaan Program Bidang Perumahan Dan Permukiman	Koordinasi Perencanaan Program Bidang Perumahan Dan Permukiman	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		7. Koordinasi Perencanaan Program Bidang Sumber Daya Air	Koordinasi Perencanaan Program Bidang Sumber Daya Air	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		8. Lokakarya Perencanaan Penanganan Sumber Daya Air Dan Permukiman	Lokakarya Perencanaan Penanganan Sumber Daya Air Dan Permukiman	1 Dokumen Prosiding	1 Dokumen Prosiding	1 Dokumen Prosiding	100
		9. Koordinasi Perencanaan Program Bidang Prasarana Transportasi	Koordinasi Perencanaan Program Bidang Prasarana Transportasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target		Realisasi	%
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8
		10. Lokakarya Perencanaan Penanganan Infrastruktur Wilayah	Lokakarya Perencanaan Penanganan Infrastruktur Wilayah	1 Dokumen Prosiding	1 Dokumen Prosiding	1 Dokumen Prosiding	100
		11. Koordinasi Perencanaan Dak Bidang Infrastruktur Wilayah	Koordinasi Perencanaan DAK Bidang Infrastruktur Wilayah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		12. Koordinasi Perencanaan Program AMPL/PPSP	Koordinasi Perencanaan Program AMPL/PPSP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		13. Penjaminan Kualitas Dokumen PPSP Kab/Kota Tahun 2014	Penjaminan Kualitas Dokumen PPSP Kab/Kota Tahun 2014	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		14. Workshop Fasilitasi Penyusunan SSK Dan MPS Kab/Kota	Workshop Fasilitasi Penyusunan SSK Dan MPS Kab/Kota	1 Dokumen Prosiding	1 Dokumen Prosiding	1 Dokumen Prosiding	100
		15. Penyusunan Data Dan Informasi Bidang Infrastruktur Wilayah	Penyusunan Data Dan Informasi Bidang Infrastruktur Wilayah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		16. Analisa Pencapaian Target Kinerja Pembangunan Bidang Infrastruktur Wilayah	Analisa Pencapaian Target Kinerja Pembangunan Bidang Infrastruktur Wilayah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		17. Analisa Perkembangan Infrastruktur Jalan Mendukung Kawasan Strategis Prioritas	Analisa Perkembangan Infrastruktur Jalan Mendukung Kawasan Strategis Prioritas	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		18. Study Kebutuhan Infrastruktur Pada Kawasan Strategis Bayah Dan Cibaliung	Study Kebutuhan Infrastruktur Pada Kawasan Strategis Bayah Dan Cibaliung	1 Dokumen Kajian	1 Dokumen Kajian	1 Dokumen Kajian	100
		19.	Rakor Persiapan Penyusunan Road map sanitasi Prov. Banten		2 Dokumen	2 Dokumen	100
	Perencanaan dan Pengendalian Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban	1. Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Renja SKPD Lingkup Bidang Pemerintahan Tahun 2013	Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Renja SKPD Lingkup Bidang Pemerintahan Tahun 2013	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		2. Verifikasi Rancangan Renja SKPD Lingkup Bidang Pemerintahan Tahun 2015	Verifikasi Rancangan Renja SKPD Lingkup Bidang Pemerintahan Tahun 2015	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		3. Verifikasi Renja Perubahan SKPD Lingkup Bidang Pemerintahan	Verifikasi Renja Perubahan SKPD Lingkup Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		4. Rapat Koordinasi SKPD Lingkup Bidang Pemerintahan	Rapat Koordinasi SKPD Lingkup Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		5. Koordinasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah Lingkup Bidang Pemerintah	Koordinasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah Lingkup Bidang Pemerintah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target		Realisasi	%
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8
		6. Rakor Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Rakor Aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		7. Penyusunan Laporan Aksi Daerah Mendukung Pencapaian Sasaran Program Inpres 1 Tahun 2012	Penyusunan Laporan Aksi Daerah Mendukung Pencapaian Sasaran Program Inpres 2 Tahun 2014	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100
		8. Rakor Penyusunan Program Kegiatan Hak Asazi Manusia (HAM)	Rakor Penyusunan Program Kegiatan Hak Asazi Manusia (HAM)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		9. Penyusunan Laporan Rencana Aksi Daerah Mendukung Pencapaian Sasaran Program Inpres 3 Tahun 2010	Penyusunan Laporan Rencana Aksi Daerah Mendukung Pencapaian Sasaran Program Inpres 3 Tahun 2010	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100
		10.	Rakor Evaluasi Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014		1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Gender	1. Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Renja SKPD Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2013	Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Renja SKPD Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2013	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100
		2. Verifikasi Rancangan Renja SKPD Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2015	Verifikasi Rancangan Renja SKPD Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2015	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100
		3. Verifikasi Renja Perubahan SKPD Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2014	Verifikasi Renja Perubahan SKPD Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2014	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100
		4. Koordinasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional Daerah Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2015	Koordinasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional Daerah Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2015	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100
		5. Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran PUHA	Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran PUHA	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100
		6. Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran PUG	Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran PUG	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100
		7. Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran Penanggulangan HIV/AIDS Dan Narkoba	Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran Penanggulangan HIV/AIDS Dan Narkoba	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100
		8. Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Kab/Kota Sehat	Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Kab./Kota Sehat	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target		Realisasi	%
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8
		9. Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran Program Kelangsungan Hidup Perkembangan Perlindungan Ibu Dan Anak	Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran Program Kelangsungan Hidup Perkembangan Perlindungan Ibu Dan Anak (KHPIIA)	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100
	Perencanaan dan Pengendalian SDM, Budaya dan Keagamaan	1. Evaluasi Renja SKPD Mitra Tahun 2013	Evaluasi Renja SKPD Tahun 2013	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		2. Verifikasi Renja SKPD Mitra Tahun 2015	Verifikasi Renja SKPD Mitra Tahun 2015	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		3. Verifikasi Renja Perubahan SKPD Mitra Tahun 2014	Verifikasi Renja Perubahan SKPD Mitra Tahun 2014	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		4. Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang SDM Tahun 2015	Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang SDM Tahun 2015	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		5. Rakor Bidang Sosmas	Rakor Bidang Sosmas	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		6. Fasilitasi Koordinasi Relevansi Pendidikan dan Ketenagakerjaan	Fasilitasi Koordinasi Relevansi Pendidikan dan Ketenagakerjaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		7. Pemetaan Pengembangan Daya Saing SDM	Pemetaan Pengembangan Daya Saing SDM	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		8. Peningkatan Akses Pendidikan Kejuruan di Kawasan Strategis dan Perbatasan	Peningkatan Akses Pendidikan Kejuruan di Kawasan Strategis dan Perbatasan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	1. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program-Program Penanggulangan Kemiskinan	Pengendalian Dan Evaluasi Program-Program Penanggulangan Kemiskinan	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	100
		2. Rapat Koordinasi Penanggulangan kemiskinan Provinsi Banten Tahun 2014	Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Prov. Banten Tahun 2014	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		3. Rapat Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat	Rapat Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		4. Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) dan JAMSOSRATU	Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dan JAMSOSRATU	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		5. Penyusunan Rencana Kerja Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015	Penyusunan Rencana Kerja Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015	16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	100
		6. Pelatihan Pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan	Pelatihan Pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target		Realisasi	%
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8
		7. Penyusunan Dokumen Program Pembangunan Perdesaan Terpadu (P3T) Tahun 2015	Penyusunan Dokumen Program Pembangunan Perdesaan Terpadu (P3T) Tahun 2015	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		8. Monitoring dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan	Monitoring Dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		9. Penyusunan Peraturan Gubernur Banten tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017	Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Banten Tahun 2012 - 2017	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		10.	Penyusunan Laporan Percepatan Pencapaian Target MDGs Provinsi Banten		7 Dokumen	7 Dokumen	100
		11.	Study Komparasi untuk Pergub Penanggulangan Kemiskinan		1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Perencanaan dan Pengendalian Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan	1. Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Tim Kerja Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Provinsi Banten	Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Tim kerja Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan ekonomi Indonesia Provinsi Banten	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		2. Penyusunan Kerangka Pengembangan Regulasi KP3EI Banten	Penyusunan Kerangka Pengembangan Regulasi KP3EI Banten	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		3. Penyusunan Kerangka Pengembangan Konektivitas KP3EI Banten	Penyusunan Kerangka Pengembangan Konektivitas KP3EI	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		4. Penyusunan Kerangka Pengembangan SDM dan IPTEK KP3EI Banten	Penyusunan Kerangka Pengembangan SDM dan IPTEK KP3EI Provinsi Banten	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		5.	Fasilitasi Kepengurusan KPI Di Provinsi Banten		1 Dokumen	1 Dokumen	100

3. Sasaran strategis (program) Pengendalian Pembangunan Daerah dengan pagu sebesar Rp. 2.847.000.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 2.502.641.600,00 (87,90%) sedangkan realisasi fisik yang dicapai 91,56% dari target 100 % yang telah ditetapkan, hal ini ditunjang oleh 2 (dua) kegiatan sehingga capaian dimaksud tidak terealisasi seluruhnya dikarenakan ada 1 (satu) tolok ukur Kajian Indikator Kinerja Utama SKPD Provinsi Banten tidak dilaksanakan, disebabkan keterbatasan waktu pelaksanaan lelang (gagal lelang).

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran Ketiga

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Tahun 2013		Capaian Kinerja Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja Tahun 2014
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cakupan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan	Prosen	100	100	100%	100	91,56	91,56%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran pada tabel tersebut diatas terlihat bahwa indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan capaian kinerja sebesar 91,56%, Perbandingan capaian kinerja tahun 2013 dengan capaian kinerja 2014 sesuai dengan target yang ditetapkan.

Rencana dan realisasi target kinerja tolok ukur kinerja output dari kegiatan dalam mendukung capaian indikator sasaran pada tahun 2014 dalam mencapai indikator sasaran, sebagai berikut:

TABEL 3.7

**RENCANA DAN REALISASI CAPAIAN INDIKATOR
KINERJA OUTPUT KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2014**

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target		Realisasi	%
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengendalian Pembangunan Daerah						
	Pengendalian dan Evaluasi Program APBD	1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Banten Tahun 2013	Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Banten Tahun 2013	1 Dokumen (40 buku)	1 Dokumen (40 buku)	1 Dokumen (40 buku)	100
		2. Penyusunan LKPJ Gubernur Banten Tahun 2012	Penyusunan LKPJ Gubernur Banten Tahun 2013	1 Dokumen (200 buku)	1 Dokumen (200 buku)	1 Dokumen (200 buku)	100
		3. Evaluasi Kebijakan Rencana Pembangunan Kab/Kota Tahun 2013	Evaluasi Kebijakan Rencana Pembangunan Kab/Kota Tahun 2013	1 Dokumen (50 buku)	1 Dokumen (50 buku)	1 Dokumen (50 buku)	100
		4. Penyusunan TAPKIN dan IKU Provinsi Banten Tahun 2014	Penyusunan TAPKIN dan IKU Provinsi Banten Tahun 2014	1 Dokumen (80 buku)	1 Dokumen (80 buku)	1 Dokumen (80 buku)	100
		5. Penyusunan Pelaporan Program Triwulanan APBD Provinsi Banten Tahun 2014	Penyusunan Pelaporan Program Triwulanan APBD Provinsi Banten TA. 2014	4 Dokumen (80 buku)	4 Dokumen (80 buku)	4 Dokumen (80 buku)	100
		6. Pemantauan Hasil Pelaksanaan APBD Provinsi Banten TA. 2014	Pemantauan Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Banten Tahun 2014	2 Dokumen (20 buku)	2 Dokumen (20 buku)	2 Dokumen (20 buku)	100
		7. Verifikasi Pengendalian Capaian Kinerja Program APBD Provinsi Banten Tahun 2014	Verifikasi Pengendalian Capaian Kinerja Program APBD Provinsi Banten Tahun 2014	1 Dokumen (50 buku)	1 Dokumen (50 buku)	1 Dokumen (50 buku)	100
		8. Evaluasi RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012 - 2017	Evaluasi RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017	1 Dokumen (50 buku)	1 Dokumen (50 buku)	1 Dokumen (50 buku)	100
		9.	Sosialisasi Pedoman Pengendalian dan evaluasi Rencana Tahun 2015		1 Dokumen (50 Buku)	1 Dokumen (50 Buku)	100
		10.	Kajian Indikator Kinerja Utama SKPD Provinsi Banten		1 Dokumen	1 Dokumen	0,76
	Pengendalian dan Evaluasi Program APBN dan Dana Lainnya	1. Pengendalian Dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan APBN 2014	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun 2014	8 Dokumen (120 Buku)	8 Dokumen (120 Buku)	8 Dokumen (120 Buku)	100
		2. Pengendalian Dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan DAK 2014	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan DAK Tahun 2014	4 Dokumen (80 Buku)	4 Dokumen (80 Buku)	4 Dokumen (80 Buku)	100

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target		Realisasi	%
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Pengendalian Dan Evaluasi Hasil Pemantauan Kinerja Pelaksanaan Renc. Pemb. Daerah Sumber Dana APBN Dan Dana Lainnya Tahun 2014	Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pemantauan Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Sumber Dana APBN dan Dana Lainnya Tahun 2014	2 Dokumen (40 Buku)	2 Dokumen (40 Buku)	2 Dokumen (40 Buku)	100

4. Sasaran strategis (program) Kerjasama Pembangunan Daerah dengan pagu sebesar Rp. 1.200.000.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 1.154.581.091,00 (96,22%) sedangkan realisasi fisik yang dicapai 100% dari target 3 Dokumen yang telah ditetapkan, hal ini ditunjang oleh 1 (satu) kegiatan sehingga capaian dimaksud dapat terealisasi seluruhnya.

Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Sasaran Ketiga

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Tahun 2013		Capaian Kinerja Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja Tahun 2014
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah	Dokumen	3	3	100%	3	3	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran pada tabel tersebut diatas terlihat bahwa indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%, Perbandingan capaian kinerja tahun 2013 dengan capaian kinerja 2014 sesuai dengan target yang ditetapkan.

Rencana dan realisasi target kinerja tolok ukur kinerja output dari kegiatan dalam mendukung capaian indikator sasaran pada tahun 2014 dalam mencapai indikator sasaran, sebagai berikut:

TABEL 3.9

**RENCANA DAN REALISASI CAPAIAN INDIKATOR
KINERJA OUTPUT KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2014**

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target		Realisasi	%
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kerjasama Pembangunan Daerah						
	Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan	1. Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Renja SKPD Lingkup Tata Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan Daerah Tahun 2013	Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Renja SKPD lingkup Tata Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan Daerah Tahun 2013	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		2. Verifikasi Rancangan Renja Tata Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan Tahun 2015	Verifikasi Rancangan Renja Tata Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan Daerah Tahun 2015	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100
		3. Rakor Kerjasama Pembangunan Lintas Wilayah dan Sektor Provinsi Banten Tahun 2014	Rakor Kerjasama Pembangunan Lintas Wilayah dan sektor Provinsi Banten Tahun 2014	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		4. Evaluasi Musrenbang Regional Se Jawa-Bali	Evaluasi Musrenbang Regional se- Jawa Bali	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100
		5. Koordinasi Tata Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan	Koordinasi Tata Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		6. Koordinasi Perencanaan Kerjasama Antar Kab/Kota	Koordinasi Perencanaan Kerjasama antar Kab/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		7. Koordinasi Penyiapan Kerjasama Pemerintah Swasta	Koordinasi Penyiapan Kerjasama Pemerintah Swasta	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		8. Koordinasi Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS)	Koordinasi Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		9. Koordinasi Perencanaan Reformasi dan Birokrasi	Koordinasi Perencanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		10.	Koordinasi perencanaan Desa Perbatasan Terpadu Banten - Jawa Barat		1 Dokumen	1 Dokumen	100
		11.	Koordinasi Perencanaan Kerjasama SERAGON		1 Dokumen	1 Dokumen	100
		12.	Penyusunan Renstra SERAGON		1 Dokumen	1 Dokumen	100

5. Sasaran strategis (program) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dengan pagu sebesar Rp. 1.958.000.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 1.904.399.900,00 (97,26%) sedangkan realisasi fisik yang dicapai 100% dari target 100 % yang telah ditetapkan, hal ini ditunjang oleh 2 (dua) kegiatan sehingga capaian dimaksud dapat terealisasi seluruhnya.

Tabel 3.10
Analisis Pencapaian Sasaran Ketiga

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Tahun 2013		Capaian Kinerja Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja Tahun 2014
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rasio Ketersediaan dokumen penatausahaan, Pengendalian dan evaluasi Laporan Keuangan	Prosen	100	100	100%	100	100	100%
2	Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan	Prosen	100	100	100%	100	100	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran pada tabel tersebut diatas terlihat bahwa indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%, Perbandingan capaian kinerja tahun 2013 dengan capaian kinerja 2014 sesuai dengan target yang ditetapkan.

Rencana dan realisasi target kinerja tolok ukur kinerja output dari kegiatan dalam mendukung capaian indikator sasaran pada tahun 2014 dalam mencapai indikator sasaran, sebagai berikut:

TABEL 3.11

**RENCANA DAN REALISASI CAPAIAN INDIKATOR
KINERJA OUTPUT KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2014**

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target		Realisasi	%
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;						
	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah						
	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	1. Penyusunan Dokumen Evaluasi LRA, Neraca dan CaLK SKPD BAPPEDA Provinsi Banten TA. 2013	Penyusunan Dokumen Evaluasi LRA, Neraca dan CaLK SKPD Bappeda Provinsi Banten TA. 2013	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		2. Penyusunan Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Anggaran Internal Kegiatan SKPD Bappeda Provinsi Banten TA 2014	Penyusunan Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Anggaran Internal Kegiatan SKPD Bappeda Provinsi Banten TA. 2014	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		3. Penyusunan Verifikasi Kode Rekening anggaran dan Penyesuaian Tarif Harga Satuan sesuai Standar Satuan Harga (SSH) pada Kegiatan Bappeda Provinsi Banten TA. 2014	Penyusunan Verifikasi Kode Rekening Anggaran dan Penyesuaian Tarif Harga Satuan sesuai Standar Biaya Umum (SBU) pada kegiatan Bappeda Provinsi Banten TA. 2014	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		4. Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi dan Pencocokan Data Akuntansi (SP2D) Penyerapan Anggaran Kegiatan pada SKPD Bappeda Provinsi Banten TA. 2014	Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi dan pencocokan Data Akuntansi (SP2D) Penyerapan Anggaran Kegiatan pada SKPD Bappeda Provinsi Banten TA. 2014	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		5. Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi dan Pencocokan Data Aset dan Inventarisasi Barang Persediaan pada SKPD BAPPEDA Provinsi Banten	Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi dan pencocokan Data Aset dan Inventarisasi Barang persediaan pada SKPD Bappeda Provinsi Banten	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		6. Penyusunan Dokumen SPP, SPM, SP2D dan SPJ Kegiatan Bappeda Provinsi Banten TA 2014	Penyusunan Dokumen SPP, SPM, SP2D, dan SPJ Kegiatan Bappeda Provinsi Banten TA. 2014	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target		Realisasi	%
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8
		7. Penyusunan Dokumen LRA, Neraca dan CaLK Laporan Akuntabilitas Kegiatan SKPD Bappeda Provinsi Banten TA. 2014	Penyesuaian Dokumen LRA, Neraca dan Calk Laporan Akuntabilitas Kegiatan SKPD BAPPEDA Provinsi Banten TA. 2014	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		8. Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Inventarisasi Barang/Jasa Aset Kegiatan SKPD Bappeda Provinsi Banten TA 2014	Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Inventarisasi Barang/Jasa (Aset) Kegiatan SKPD Bappeda Provinsi Banten TA. 2014	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		9. Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi Data Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Kegiatan Bappeda Provinsi Banten Sumber Dana APBN TA. 2014 Periode TW I; TW II; TW III; TW IV	Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi dan Sistem Akuntabilitas Instansi (SAI) Kegiatan Bappeda Provinsi Banten Sumber Dana APBN TA. 2014 Priode TW I, TW II, TW III, dan TW IV	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		10. Penyusunan Dokumen Neraca, LRA dan CaLK Kegiatan Sumber Dana APBN Satker Bappeda Provinsi Banten TA. 2014 Semester I dan Semester II	Penyusunan Dokumen Neraca, LRA dan Calk Kegiatan Kegiatan sumber Dana APBN Satker Bappeda Provinsi Banten TA. 2014 Semester I dan II	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		11. Penyusunan Dokumen Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Kegiatan BAPPEDA Provinsi Banten TA. 2014	Penyusunan Dokumen Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Kegiatan Bappeda Provinsi Banten TA. 2014	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		12. Penyusunan Dokumen Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kegiatan BAPPEDA Provinsi Banten TA. 2014	Penyusunan Dokumen Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kegiatan Bappeda Provinsi Banten TA. 2014	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1. Penyusunan LAKIP Bappeda Provinsi Banten Tahun 2013	Penyusunan LAKIP Bappeda Provinsi Banten 2013	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		2. Penyusunan LKPJ Bappeda Provinsi Banten Tahun 2013	Penyusunan LKPJ Bappeda Provinsi Banten 2013	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		3. Penyusunan LPPD Bappeda Provinsi Banten Tahun 2013	Penyusunan LPPD Bappeda Provinsi Banten 2013	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		4. Penyusunan Evaluasi Semesteran Kegiatan Bappeda Provinsi Banten Tahun 2014	Penyusunan Evaluasi Semesteran Kegiatan Bappeda Tahun 2014	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		5. Penyusunan Evaluasi Kegiatan Bappeda Akhir Tahun 2014	Penyusunan Evaluasi Kegiatan Bappeda Akhir Tahun 2014	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target		Realisasi	%
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8
		6. Penyusunan TAPKIN dan IKU Bappeda Provinsi Banten Tahun 2014	Penyusunan TAPKIN dan IKU Bappeda Provinsi Banten 2014	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		7. Penyusunan RENJA Bappeda Provinsi Banten Tahun 2015	Penyusunan RENJA Bappeda Provinsi Banten 2015	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		8. Penyusunan Rencana Operasional Kegiatan Tahun 2015	Penyusunan Rencana Operasional Kegiatan Tahun 2015	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		9. Penyusunan DRPK Tahun 2015	Penyusunan DRPK Tahun 2015	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		10. Penyusunan Kerangka Logis dan Perubahan Penganggaran Bappeda Provinsi Banten Tahun 2014	Penyusunan Kerangka Logis dan Perubahan Penganggaran Bappeda Tahun Anggaran 2014	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		11. Penyusunan Kerangka Logis dan Perubahan Penganggaran Bappeda Provinsi Banten Tahun 2015	Penyusunan Kerangka Logis dan Perubahan Penganggaran Bappeda Tahun Anggaran 2015	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		12. Penyusunan Usulan Standar Satuan Harga Bappeda Provinsi Banten	Penyusunan Standar Satuan Harga	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		13. Penyusunan Laporan Bulanan Kegiatan Bappeda Provinsi Banten Tahun 2014	Penyusunan Laporan Bulanan Kegiatan Bappeda Provinsi Banten Tahun 2014	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100
		14. Penyusunan Laporan Barang/Jasa Kegiatan Bappeda Provinsi Banten	Penyusunan Laporan Barang/Jasa Kegiatan Bappeda Provinsi Banten	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100
		15. Forum Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Banten	Forum Perencanaan Pembangunan Bappeda se Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		16. Forum PEP SKPD se Provinsi Banten	Forum PEP SKPD se Provinsi Banten	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		17. Penyusunan Dokumen evaluasi dan Inventarisasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Aparat Pemeriksa instansi Pemerintah (APIP) TA. 2014	Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Inventarisasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh aparat Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP) Tahun Anggaran 2014	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		18. Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP) TA sebelumnya dan TA 2014	Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP) Tahun Anggaran sebelum dan Tahun Anggaran 2014	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		19. Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Daerah (SIMRENDA)	Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Rencana Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target		Realisasi	%
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8
		20. Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Daerah (SIMPELDA)	Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		21.	Penyusunan Pedoman Umum Pemberian Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota Sumber dana APBD Provinsi Banten TA. 2014		1 Dokumen	1 Dokumen	100

6. Sasaran strategis (program) Peningkatan Sarana, Prasarana Perakntoran dan Kapasitas Aparatur dengan pagu sebesar Rp. 11.274.000.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 10.765.200.811,00 (95,49%) sedangkan realisasi fisik yang dicapai 100% dari target 100 % yang telah ditetapkan, hal ini ditunjang oleh 5 (Lima) kegiatan sehingga capaian dimaksud dapat terealisasi seluruhnya.

Tabel 3.12
Analisis Pencapaian Sasaran Ketiga

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Tahun 2013		Capaian Kinerja Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja Tahun 2014
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan	Prosen	100	100	100%	100	100	100%
2	Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar Daerah	Prosen	100	100	100%	100	100	100%
3	Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur	Prosen	100	100	100%	100	100	100%

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Tahun 2013		Capaian Kinerja Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja Tahun 2014
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian	Prosen	100	100	100%	100	100	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran pada tabel tersebut diatas terlihat bahwa indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%, Perbandingan capaian kinerja tahun 2013 dengan capaian kinerja 2014 sesuai dengan target yang ditetapkan.

Rencana dan realisasi target kinerja tolok ukur kinerja output dari kegiatan dalam mendukung capaian indikator sasaran pada tahun 2014 dalam mencapai indikator sasaran, sebagai berikut:

TABEL 3.13
RENCANA DAN REALISASI CAPAIAN INDIKATOR
KINERJA OUTPUT KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2014

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target		Realisasi	%
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur						
	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan Aparatur Bappeda Provinsi Banten	1. Pengembangan Wawasan Aparatur Bappeda Provinsi Banten	Pengembangan Wawasan Aparatur Bappeda Provinsi Banten	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100
		2. Peningkatan Kompetensi Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Aparatur Bappeda Provinsi Banten	Peningkatan Kompetensi Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Aparatur Bappeda Provinsi Banten	40 orang	40 orang	40 orang	100

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target		Realisasi	%
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Peningkatan Kompetensi Pengembangan Sistem Informasi Bappeda Provinsi Banten	Peningkatan Kompetensi Pengembangan Sistem Informasi Bappeda Provinsi Banten	30 orang	30 orang	30 orang	100
		4. Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan Golongan PNS BAPPEDA Provinsi Banten	Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan Golongan PNS Bappeda Provinsi Banten	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		5. Fasilitasi Kenaikan Gaji Berkala PNS BAPPEDA Provinsi Banten	Fasilitasi Kenaikan Gaji Berkala PNS Bappeda Provinsi Banten	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		6. Fasilitasi Perkuatan dan Validasi Data Pegawai BAPPEDA Provinsi Banten	Fasilitasi Perkuatan Kelembagaan dan Validasi Data Kepegawaian Bappeda Provinsi Banten	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		7. Pemutakhiran Data Kepegawaian BAPPEDA Provinsi Banten	Pemutakhiran Data Kepegawaian Bappeda Provinsi Banten	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		8. Pekan Ilmiah Internal BAPPEDA Provinsi Banten	Pekan Ilmiah Internal Bappeda Provinsi Banten	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		9. Fasilitasi Pengiriman Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS	Fasilitasi Pengiriman Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	5 Orang	5 Orang	5 Orang	100
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1. Pemeliharaan Gedung dan Halaman	Pemeliharaan Gedung dan Halaman	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100
		2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	12 Bulan, 21 Unit Kendaraan Operasional Roda Empat dan 22 unit kendaraan Operasional Roda Dua	12 Bulan, 21 Unit Kendaraan Operasional Roda Empat dan 22 unit kendaraan Operasional Roda Dua	12 Bulan, 21 Unit Kendaraan Operasional Roda Empat dan 22 unit kendaraan Operasional Roda Dua	100
		3. Pemeliharaan Barang Inventarisasi Kantor	Pemeliharaan Inventaris Kantor	12 Bulan, Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan, Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan, Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor	100
	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	1. Penunjang Penguatan Kelembagaan	Penunjang Penguatan Kelembagaan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		2. Penyediaan Barang Habis Pakai	Penyediaan Barang Habis Pakai	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100
		3. Penyediaan Barang Cetak	Penyediaan Bahan Cetak	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100
		4. Penyediaan Makanan dan Minum Kantor	Pengadaan Makanan dan Minum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100
		5. Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internet dan PHBI/PHBN	Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internet dan PHBI/PHBN	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100
		6. Konsultasi dan Koordinasi Dalam dan Luar Wilayah Provinsi Banten	Konsultasi dan Koordinasi Dalam dan Luar Wilayah Provinsi	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100
		7. Fasilitasi Penunjang Kegiatan Kantor	Fasilitas Penunjang Kegiatan dan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target		Realisasi	%
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	1. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat angkut darat bermotor micro bus berpenumpang 15-30 orang)	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	7 unit	7 Unit	7 Unit	100
		2. Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik	Pengadaan AC	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100
		3. Belanja Modal Pengadaan Penghancur Kertas	Pengadaan Infocus + screnfiw	7 Unit	7 Unit	7 Unit	100
		4. Belanja Modal Pengadaan mesin absensi	Pengadaan Mesin Tik Elektrikal	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100
		5. Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	Pengadaan Mesin Finger Print (Absen)	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100
		6. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Halaman Kantor	Pengadaan TV	2 paket	6 Unit	6 Unit	100
		7. Belanja modal pengadaan komputer/PC	Pengadaan Marka Jalan Halaman Kantor Bappeda	10 unit	1 Paket	1 Paket	100
		8. Belanja modal pengadaan komputer Note Book/Net Book/Laptop/Tablet	Pengadaan Pembangunan/ Penambahan Pos Keamanan	20 unit	1 Paket	1 Paket	100
		9. Belanja modal pengadaan Printer	Pengadaan Pembuatan Pintu Gerbang Timur Kantor Bappeda	10 unit	1 Paket	1 Paket	100
		10. Belanja Modal Pengadaan Sofa	Pengadaan Komputer PC	1 set	10 Unit	10 Unit	100
		11. Belanja Modal Pengadaan AC	Pengadaan Note Book	10 unit	10 Unit	10 Unit	100
		12. Belanja Modal Pengadaan TV	Pengadaan PC Tablet	6 unit	10 Unit	10 Unit	100
		13. Belanja Modal Penghias Ruangan	Pengadaan Printer	1 paket	10 Unit	10 Unit	100
		14. Belanja Modal Pengadaan Proyektor	Pengadaan Sofa Lobby	7 unit	1 Set	1 Set	100
		15. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian gedung kantor	Pengadaan Interior Muka Ruang Rapat Paripurna	1 paket	1 Paket	1 Paket	100
		16.	Pembangunan Pintu Gerbang sebelah Selatan Kantor Bappeda		4 Unit	4 Unit	100
		17.	Pengadaan Server dan Instalasinya		4 Unit	4 Unit	100
		18.	Pengadaan Printer		1 Paket	1 Paket	100
		19.	Belanja Modal Pengadaan Kursi/Meja Kantin		1 Paket	1 Paket	100
		20.	Pengadaan AC Split 2 pk		10 Unit	10 Unit	100
		21.	Belanja Modal Pengadaan Interior Ruang Sekretaris Bappeda Provinsi Banten		1 Paket	1 Paket	100
		22.	Belanja Modal Pengadaan Interior Ruang Perpustakaan		10 Unit	10 Unit	100

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target		Realisasi	%
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8
		23.	Belanja Modal Pengadaan Antena Penangkal Petir		1 Paket	1 Paket	100
		24.	Belanja Modal Pengadaan Alat Alat Angkutan Darat Bermotor Roda Dua		1 Paket	1 Paket	100
		25.	Belanja Modal Mesin Hitung		1 Paket	1 Paket	100
		26.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC		2 Unit	2 Unit	100
		27.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook		2 Unit	2 Unit	100
		28.	Belanja Modal Pengadaan Interior Ruang Kepala Bidang Pengendalian Program		10 Unit	10 Unit	100
		29.	Belanja Modal Pengadaan Interior Ruang Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah		8 Unit	8 Unit	100
		30.	Belanja Modal Pengadaan Interior Ruang Kepala Bidang Sosial Masyarakat		1 Paket	1 Paket	100
		31.	Belanja Modal Pengadaan Interior Ruang Kepala Bidang Perekonomian		1 Paket	1 Paket	100
	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	1.	Bimbingan Aplikasi Kearsipan Dinamis Bappeda	Bimbingan Aplikasi Kearsipan Dinamis Bappeda	1 Keg 25 Orang		100
		2.	Pengembangan Perpustakaan Khusus Bappeda	Pengembangan Perpustakaan Khusus Bappeda	1 Keg 15 Orang		100
		3.	Membangun Software Aplikasi Arsip dan Perpustakaan Khusus Bappeda	Membangun Software Aplikasi Arsip dan Perpustakaan Khusus Bappeda	1 dok		100

7. Sasaran strategis (program) Penyediaan Data Pembangunan Daerah dengan pagu sebesar Rp. 850.000.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 833.194.800,00 (98,02%) sedangkan realisasi fisik yang dicapai 100% dari target 100 % yang telah ditetapkan, hal ini ditunjang oleh 1 (satu) kegiatan sehingga capaian dimaksud dapat terealisasi seluruhnya.

Tabel 3.14
Analisis Pencapaian Sasaran Ketiga

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Tahun 2013		Capaian Kinerja Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja Tahun 2014
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan	Dokumen	2	2	100%	2	2	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran pada tabel tersebut diatas terlihat bahwa indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%, Perbandingan capaian kinerja tahun 2013 dengan capaian kinerja 2014 sesuai dengan target yang ditetapkan.

Rencana dan realisasi target kinerja tolok ukur kinerja output dari kegiatan dalam mendukung capaian indikator sasaran pada tahun 2014 dalam mencapai indikator sasaran, sebagai berikut:

TABEL 3.15
RENCANA DAN REALISASI CAPAIAN INDIKATOR
KINERJA OUTPUT KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2014

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target		Realisasi	%
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Statistik;						
	Penyediaan Data Pembangunan Daerah						
	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	1. Penyusunan Data Pembangunan Daerah	Penyusunan Data Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		2. Forum Data Pembanguna Daerah (Provinsi dan Kab./Kota)	Forum Data Pembanguna Daerah (Provinsi dan Kab./Kota)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		3. Penyusunan Data Pembangunan SKPD dan Kab./Kota	Penyusunan Data Pembangunan SKPD dan Kab./Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		4. Pengukuran Ketahanan Nasional di Daerah	Pengukuran Ketahanan Nasional di Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target		Realisasi	%
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8
		5. Penyusunan Data Output Kegiatan SKPD Sesuai RPJMD	Penyusunan Data Output Kegiatan SKPD sesuai RPJMD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		6. Penyusunan Roodmap Pengelolaan Data Pembangunan di Daerah 2014-2017	Penyusunan Roodmap Pengelolaan Data Pembangunan di Daerah 2014-2017	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		7. Penyusunan Juknis Bantuan Keuangan Update Data Pelaporan Kab./Kota Tahun 2015	Penyusunan Juknis Bantuan Keuangan Update Data Pelaporan Kab./Kota Tahun 2015	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		8. Koordinasi Kelayakan Hibah BPS Provinsi Banten Tahun 2015	Koordinasi Kelayakan Hibah BPS Provinsi Banten Tahun 2015	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		9. Penyusunan Profile Informasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Profile Informasi Pembangunan Daerah	1 Video Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Banten, Publikasi Data Pembangunan Daerah (Booklet, Leaflet, Banner)	1 Video Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Banten, Publikasi Data Pembangunan Daerah (Booklet, Leaflet, Banner)	1 Video Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Banten, Publikasi Data Pembangunan Daerah (Booklet, Leaflet, Banner)	100
		10. Penyusunan Sistem Pengelolaan Data Pembangunan Daerah	Penyusunan Sistem Pengelolaan Data Pembangunan Daerah	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100

3.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam hal ini adalah akuntabilitas Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten yang merupakan perwujudan kewajiban Bappeda Provinsi Banten untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan tugas pokok dan fungsi melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mencapai Visi, Misi, tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Akuntabilitas dalam hal ini adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang dalam meminta atau pertanggungjawaban dari rencana yang telah dilaksanakan. Sedangkan kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari Visi, Misi dan Strategi Bappeda

Provinsi Banten yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas kinerja keuangan pada umumnya adalah merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dari anggaran program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, sampai sejauh mana realisasinya dalam menunjang pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Anggaran yang telah digunakan untuk belanja pembangunan terdiri dari belanja langsung yang dipengaruhi oleh program dan berkinerja dan belanja tidak langsung yang tidak dipengaruhi oleh program yang dalam hal ini tidak berkinerja.

Realisasi anggaran program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten sampai dengan Bulan Desember Tahun 2014 yang digunakan untuk Belanja Tidak Langsung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.136.000.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 7.714.273.036,- atau sebesar 94,82 % sedangkan Belanja Langsung dengan pagu anggaran Rp. 31.000.000.000,- telah terealisasi sebesar Rp 29.444.449.860,- atau sebesar 94,98 % dan realisasi fisik mencapai 99,23%, realisasi fisik Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014 pagu kegiatan Rp. 39.136.000.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 37.158.722.896,- atau sebesar 94,95% dan realisasi fisik mencapai 99,39%.

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 sampai dengan Bulan Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16.

**REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
BAPPEDA PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

No	Program/Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Perubahan	Realisasi		%
				Fisik (%)	Keuangan (Rp)	
1	2	3		4	5	6
I.	Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan	1.049.025.000,00	1.199.025.000,00	100,00	1.144.637.200,00	95,46
1.	Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1.049.025.000,00	1.199.025.000,00	100,00	1.144.637.200,00	95,46
II.	Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	10.271.975.000,00	11.671.975.000,00	100,00	11.139.794.458,00	95,44
1.	Perencanaan Pembangunan Daerah	2.471.000.000,00	2.671.000.000,00	100,00	2.622.993.544,00	98,20
2.	Perencanaan Anggaran Pembangunan Daerah	1.200.000.000,00	1.700.000.000,00	100,00	1.531.932.100,00	90,11
3.	Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Indagkop, Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata	800.000.000,00	850.000.000,00	100,00	786.310.000,00	92,51
4.	Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Agribisnis dan Bisnis Kelautan	800.000.000,00	950.000.000,00	100,00	941.607.300,00	99,12
5.	Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Wilayah	1.250.975.000,00	1.400.975.000,00	100,00	1.373.270.950,00	98,02
6.	Perencanaan dan Pengendalian Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban	750.000.000,00	900.000.000,00	100,00	870.836.224,00	96,76
7.	Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Gender	900.000.000,00	950.000.000,00	100,00	911.307.140,00	95,93
8.	Perencanaan dan Pengendalian SDM, Budaya dan Keagamaan	800.000.000,00	850.000.000,00	100,00	780.774.700,00	91,86

No	Program/Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Perubahan	Realisasi		%
				Fisik (%)	Keuangan (Rp)	
1	2	3		4	5	6
9.	Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	900.000.000,00	950.000.000,00	100,00	914.795.500,00	96,29
10.	Perencanaan dan Pengendalian Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) Provinsi Banten	400.000.000,00	450.000.000,00	100,00	405.967.000,00	90,21
III .	Pengendalian Pembangunan Daerah	2.492.000.000,00	2.847.000.000,00	91,56	2.502.641.600,00	87,90
1.	Pengendalian dan Evaluasi Program APBD	1.737.000.000,00	1.992.000.000,00	87,94	1.715.766.500,00	86,13
2.	Pengendalian dan Evaluasi Program APBN dan Dana Lainnya	755.000.000,00	855.000.000,00	100,00	786.875.100,00	92,03
IV .	Kerjasama Pembangunan Daerah	1.000.000.000,00	1.200.000.000,00	100,00	1.154.581.091,00	96,22
1.	Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan	1.000.000.000,00	1.200.000.000,00	100,00	1.154.581.091,00	96,22
V .	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1.950.000.000,00	1.985.000.000,00	100,00	1.904.399.900,00	97,26
1.	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	481.708.100,00	96,34
2.	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1.450.000.000,00	1.485.000.000,00	100,00	1.422.691.800,00	97,58
VI .	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur	9.437.000.000,00	10.867.527.500,00	100,00	10.765.200.811,00	95,49
1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	2.385.280.000,00	3.469.212.500,00	100,00	3.266.391.185,00	94,15
2.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.985.683.500,00	2.135.790.500,00	100,00	1.997.585.019,00	93,53
3.	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	4.037.536.500,00	4.578.024.500,00	100,00	4.447.807.931,00	97,16
4.	Peningkatan Kapasitas Aparatur	654.500.000,00	684.500.000,00	100,00	665.087.036,00	97,16

No	Program/Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Perubahan	Realisasi		%
				Fisik (%)	Keuangan (Rp)	
1	2	3		4	5	6
5.	Peningkatan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	374.000.000,00	406.472.500,00	100,00	388.329.640,00	95,54
VII.	Penyediaan Data Pembangunan Daerah	800.000.000,00	850.000.000,00	100,00	833.194.800,00	98,02
1.	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	800.000.000,00	850.000.000,00	100,00	833.194.800,00	98,02
	JUMLAH	27.000.000.000,00	31.000.000.000,00	99,23	29.444.449.860,00	94,98
	Belanja Tidak Langsung	8.097.000.000,00	8.136.000.000,00	100,00	7.714.273.036,00	94,82
	TOTAL	35.097.000.000,00	39.136.000.000,00	99,39	37.158.722.896,00	94,95

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten telah tersusun dengan rata-rata capaian dari pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten dengan implementasi dari kegiatan program yaitu indikator kinerja *input* tercapai 94,98 % dan indikator kinerja *output* tercapai 99,23 % dan *outcome* tercapai sebesar 100 % Sedangkan tingkat capaian untuk sasaran yang saat kegiatan program dilaksanakan tercapai 99,23 %.

Berdasarkan capaian dari pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran sasaran tersebut, maka rata-rata nilai capaian dari pengukuran kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014 sebesar 99.23 % dengan perincian sebagai berikut:

1. Indikator kinerja *input* capaian pengukurannya sebesar 94,98 % dengan nilai sangat baik.
2. Indikator kinerja *output* capaian pengukurannya sebesar 99,23 % dengan nilai sangat baik.
3. Indikator kinerja *outcome* capaian pengukurannya sebesar 99,23 % dengan nilai sangat baik.
4. Indikator kinerja capaian program pengukurannya sebesar 99,23 % dengan nilai sangat baik.

Laporan kinerja adalah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pelaksanaan kewajiban dari amanat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Perbaikan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas ini merupakan pelaksanaan dari instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam keputusan tersebut di jelaskan bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai Misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.

Sebagaimana hal tersebut diatas, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014 dalam rangka pelaksanaan amanat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 bahwa dalam rangka penyusunan laporan kinerja ini akan menjadi bahan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014.

Selanjutnya bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan kewajiban untuk disusun pada setiap akhir Tahun Anggaran oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengingat fungsi Lakip diantaranya adalah:

1. Sebagai sarana penting dalam melaksanakan reformasi dalam rangka penyelenggaraan tugas, pokok, dan fungsi pembangunan dan pelayanan masyarakat;
2. Sebagai cara dan sarana yang efektif dalam mendorong aparatur meningkatkan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dan fungsi manajemen kinerja yang konsisten;
3. Sebagai cara dan sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintahan atau SKPD berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistimatis dengan sasaran yang terukur secara berkelanjutan.
4. Sebagai alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan dan atau kegagalan dari setiap pimpinan Instansi/SKPD dalam menjalankan Misi sebagai tugas pokok dan fungsi dalam mengemban jabatan.
5. Sebagai cara dan sarana untuk mendorong penyempurnaan struktur organisasi, kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja, dan prosedur pelayanan masyarakat berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen kelembagaan yang berkelanjutan.
6. Sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang disusun oleh Pemerintah Daerah

Dalam rangka pencapaian pengukuran kinerja baik pengukuran kinerja kegiatan maupun pengukuran sasaran pada pelaksanaannya masih terdapat permasalahan dan kendala diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Masih belum maksimal dukungan sumberdaya aparatur yang kompeten dan berkualitas serta sarana dan prasarana aparatur yang memadai dalam rangka memberikan kontribusi aktif terhadap pembangunan Provinsi Banten;
2. Dalam Perencanaan pengendalian dan evaluasi diantaranya masih belum maksimal dalam penyusunan perencanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan baik internal maupun eksternal dilingkungan Bappeda Provinsi Banten;
3. Pengaturan asset belum tertib;